

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU**

Oleh :

Teddie Bernard Hernawan S.E., M.A.P., CHRMP
Kolonel Laut (P) Nrp.10706/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan XLIV tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir guna mewujudkan Ekonomi Hijau”**

Penentuan judul dan Tutor pembimbing Taskap ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional nomor 96 tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA XLIV Tahun 2022 dan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional nomor 112 tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang terhormat Bapak Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada Tutor Pembimbing Taskap yaitu Marsekal Muda TNI Anang Nurhadi S, S.E., M.M dan Tim penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai dapat terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah Taskap ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan Taskap ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2022

Penulis,



Teddie Bernard Hernawan, S.E., M.A.P., CHRMP

Kolonel Laut (P) Nrp.10706/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teddie Bernard Hernawan, S.E., M.A.P., CHRMP

Pangkat : Kolonel Laut (P) Nrp.10706/P

Jabatan : Sahli A Wilnas Panglima Koarmada I

Instansi : Koarmada I TNI AL

Alamat : JL. H. Abih No.165 RT.001 RW.007 Kel. Jatiluhur
Kec. Jatiasih Bekasi Selatan – Jawa Barat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, Oktober 2022

Penulis Taskap

Teddie Bernard Hernawan, S.E., M.A.P., CHRMP
Kolonel Laut (P) Nrp.10706/P

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan	9
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	16
11. Perkembangan Lingkungan Strategi	18
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	27
13. Kondisi Masyarakat di wilayah pesisir	27
14. Potensi Ekonomi Hijau di wilayah pesisir	30
15. Upaya pemberdayaan potensi ekonomi hijau yang ada di wilayah pesisir	37
BAB IV PENUTUP	
17. Simpulan	57

18. Rekomendasi	60
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. KUESIONER
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB - I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan yang terencana dalam rangka terwujudnya cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945. Pemerintah tidak hanya mengejar target pencapaian pembangunan, namun juga memperhatikan kelestarian alam sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang yang sejalan dengan semangat ekonomi hijau di dunia. Ekonomi hijau merupakan gerakan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kondisi kesetaraan sosial di dalam masyarakat dan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan ekonomi. Ekonomi hijau merupakan kegiatan perekonomian yang rendah emisi karbon dioksida yang mencemari lingkungan, kegiatan yang hemat energi sumber daya alam serta kegiatan perekonomian yang berkeadilan sosial¹. Pembangunan ekonomi hijau harus memenuhi 5 (lima) prinsip dasar ekonomi hijau yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip keadilan, prinsip batas planet, prinsip efisiensi dan kecukupan serta prinsip pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Indonesia sejalan dengan semangat negara-negara di dunia sejak awal abad ke 21 dengan program *Millennium Development Goals* (MDGs) dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menghadapi perubahan lingkungan dunia dan peningkatan suhu akibat kemajuan teknologi yang tidak ramah lingkungan serta penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Ekonomi hijau dalam pelaksanaannya memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa merusak lingkungan. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah

¹ <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-Indonesia>, diunduh tanggal 10 Mei 2022 pukul 10.52 Wib

tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia tahun 2020-2024, pemerintah Indonesia merancang tiga program prioritas pemerintah. Ketiga program prioritas pemerintah tersebut yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta dengan melaksanakan pembangunan rendah karbon². Presiden Joko Widodo telah menyampaikan sejumlah strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau, selain strategi pertama pembangunan rendah karbon yang tertuang pada RPJM 2020-2024, juga dengan strategi kedua yaitu kebijakan *net zero emission* pada tahun 2060 yang di dalamnya termasuk *net sink* sektor kehutanan pada tahun 2030. Strategi ketiga Presiden adalah pemberian stimulus hijau untuk merealisasikan ekonomi hijau. Hal itu disampaikan presiden pada sesi tanya jawab pada pertemuan *World Economic Forum* yang dilaksanakan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada tanggal 20 Januari 2022³.

Potensi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir cukup besar, hal ini disebabkan karena 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan wilayah pesisir dikenal sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena merupakan wilayah yang potensial untuk berkembang karena dekat dengan sarana transportasi dengan karakteristik penduduk yang dinamis akan memudahkan dalam melaksanakan pemberdayaan. Potensi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan adalah pertanian, perikanan, wisata alam, perkebunan dan potensi akan hasil dari tumbuhan yang ada untuk dijadikan kerajinan masyarakat. Permasalahan utama yang ada pada masyarakat pesisir adalah kemiskinan yang cukup tinggi, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan. Terkait kemiskinan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir di Istana Wapres pada tanggal 21 Desember 2021 menyatakan tingkat

² <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>, diunduh tanggal 7 April 2022 pukul 19.40 Wib

³ <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/hadiri-wef-presiden-jokowi-paparkan-strategi-indonesia-wujudkan-ekonomi-hijau/>, diunduh tanggal 10 April 2022 pukul 18.31 Wib.

kemiskinan di wilayah pesisir jauh lebih tinggi dari wilayah lainnya. Permasalahan tersebut membuat masyarakat pesisir rentan dalam menghadapi bencana alam dan perubahan lingkungan⁴. Contoh kemiskinan yang cukup tinggi terlihat pada kehidupan nelayan di wilayah pantai utara dan selatan Jawa yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk dapat menciptakan lapangan kerja serta memperbaiki lingkungan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayah pesisir serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang baru. Pemberdayaan harus memenuhi prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip keberlanjutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat juga harus jelas sehingga arah pemberdayaan masyarakat menjadi fokus. Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8-10) *tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat*⁵. Persoalan kompleks terjadi karena dari aspek demografi jumlah penduduk di wilayah pesisir lebih besar dari daerah lain, penduduk pesisir sebagian besar tidak bersekolah atau hanya lulusan sekolah dasar⁶. Program pengentasan kemiskinan saat ini terlihat seperti hanya membuat masyarakat miskin menengadahkan tangan saja dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), tidak memberikan solusi terhadap kemiskinan. Alangkah lebih baik jika memberikan kail kepada masyarakat untuk berusaha mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan pendampingan sehingga masyarakat miskin dapat lepas dari kemiskinan.

Profesi mayoritas masyarakat pesisir adalah nelayan dan pekerjaan yang masih terkait dengan hasil dari sektor perikanan, profesi lainnya adalah pekerja pada ekspedisi perkapalan, pegawai pada galangan, pegawai hotel, restoran dan petani. Sasaran dari pemberdayaan masyarakat pesisir adalah

⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diunduh tanggal 16 Mei pukul 06.50 Wib

⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TA/full>, diunduh tanggal 16 Mei 2022 pukul 06.52 Wib

⁶ <https://kominfo.go.id/content/detail/38902/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-wilayah-pesisir/0/berita>, diunduh tanggal 16 Mei 2022 pukul 11.32 Wib

pekerja sektor perikanan dan pegawai yang berada pada garis kemiskinan dengan prinsip kesetaraan sehingga masyarakat merasa lebih dihargai.

Hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi hijau terlihat, pemberdayaan masyarakat pesisir dan konsep ekonomi hijau sama-sama bersifat keberlanjutan sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kelestarian lingkungan dalam memanfaatkan potensi alam dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya terdapat inklusif masyarakat yang memberikan ruang dalam memberikan posisi yang lebih baik bagi masyarakat dengan melibatkan semua *stake holder* yang ada di daerah seperti instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga pendidikan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama melibatkan perusahaan yang ada untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk perhatian perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan berjalannya pemerintahan yang baik dalam melaksanakan program kerja dengan melibatkan *stake holder* yang ada di daerah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir maka kita harus memahami permasalahan agar dapat diambil langkah yang tepat dan bersifat berkelanjutan. Harus dapat menggali kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, potensi hijau apa yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan, dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Mengalir dari latar belakang di atas taskap ini akan membahas tentang **“Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Pesisir guna Mewujudkan Ekonomi Hijau”**.

2. Rumusan Masalah.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam

penulisan taskap ini adalah “**Bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir guna mewujudkan ekonomi hijau?**”.

Untuk mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dari rumusan permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dijabarkan kembali dalam beberapa pertanyaan kajian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi masyarakat di wilayah pesisir?
- b. Bagaimana potensi ekonomi hijau yang ada di wilayah pesisir?
- c. Bagaimana upaya pemberdayaan potensi ekonomi hijau di wilayah pesisir?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Kertas karya ilmiah perorangan ini disusun adalah untuk memberikan gambaran terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir guna mewujudkan ekonomi hijau yang sesuai dengan semangat pembangunan Indonesia yaitu pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. **Tujuan.** Tujuan dari penulisan taskap ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir, sebagai sumbang saran dan pikiran serta bahan masukan bagi para pemimpin dalam memberdayakan masyarakat pesisir guna mewujudkan ekonomi hijau.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang pertanian memanfaatkan potensi yang ada di wilayah pesisir.
- b. **Sistematika.** Taskap ini disusun dengan sistematika atau tata urutan sebagai berikut :
 - 1) **Bab I. Pendahuluan.** Isi dari Bab I adalah uraian latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang dipergunakan serta berisi beberapa pengertian sebagai persamaan persepsi dalam memahami pembahasan taskap ini.

- 2) **Bab II. Tinjauan Pustaka.** Dalam Bab. II dijelaskan tentang dasa-dasar pemikiran yang dipakai dalam penulisan taskap ini, diantaranya adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Taskap ini memasukkan data dan pemetaan fakta-fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka dan referensi ilmiah yang berhubungan dengan materi penulisan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategi pada tataran global, regional dan nasional. Dengan pemahaman faktor lingkungan strategis tersebut, dapat menjadi arah atau panduan yang dapat digunakan untuk memahami, menganalisis dan merumuskan kebijakan yang tepat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.
- 3) **Bab III. Pembahasan.** Bab. III berisikan analisis yang dilakukan secara detail setiap pokok-pokok bahasan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir guna mewujudkan ekonomi hijau. Pembahasan ini yang dilakukan merujuk dengan teori dan tinjauan pustaka sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Hasil analisa ini nantinya akan dirumuskan sebagai pemecahan masalah dari pokok-pokok pembahasan yang dapat menggambarkan solusi secara logis, holistik dan kontekstual.
- 4) **Bab IV. Penutup.** Pada Bab. IV akan diuraikan kesimpulan dari penulisan taskap ini dan beberapa rekomendasi yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Penulisan Taskap ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menekankan kepada pengumpulan serta analisa data dan fakta berdasarkan penelitian data primer dan sekunder.
- b. **Pendekatan.** Taskap ini disusun menggunakan pendekatan kepentingan nasional dengan analisis keterlibatan berbagai pihak berdasarkan teori yang digunakan.

6. Pengertian.

- a. **CSR** adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan, sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif terhadap lingkungan⁷.
- b. **Ekonomi hijau** adalah suatu gagasan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan yang signifikan⁸.
- c. **Hortikultura** adalah seluk beluk kegiatan atau seni bercocok tanam yang memfokuskan kepada tanaman kebun, tanaman buah, tanaman sayur dan tanaman hias⁹.
- d. **Kelompok tani** adalah sekumpulan petani yang dibentuk karena kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban meningkatkan dan mengembangkan usaha. Kelompok tani adalah kelembagaan petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian¹⁰.
- e. **Pemberdayaan masyarakat** adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, bersifat inklusif dan melibatkan masyarakat sasaran program¹¹.
- f. **Masyarakat** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam satu kebudayaan yang mereka anggap sama¹².

⁷ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pasal 74

⁸ <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>, diunduh tanggal 5 Juli 2022 pukul 19.21 WIB

⁹ <https://kbbi.web.id/hortikultura>, diunduh tanggal 6 Juli 2022 pukul 17.42 WIB

¹⁰ <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85489/KELOMPOK-TANI--FUNGSI-DAN-PERAN-KELOMPOK-TANI/>, diunduh tanggal 27 Juli 2022 pukul 19.45 WIB

¹¹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuan-nya-1vH6b5Wy9TA/2>, diunduh tanggal 16 Juni 2022 pukul 17.25 WIB

¹² <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diunduh tanggal 4 Juli 2022 pukul 19.05 WIB

- g. **Masyarakat inklusif secara sosial** adalah kondisi dimana semua orang dalam masyarakat merasa dihargai, menghormati perbedaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga dapat hidup bermartabat¹³.
- h. **Salinitas** adalah tingkat kandungan garam yang ada pada air laut, sungai dan danau dihitung dalam ‰¹⁴.
- i. **Wilayah Pesisir** adalah wilayah peralihan antara darat dan laut dimana wilayah lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, wilayah daratnya masih dipengaruhi oleh aktivitas laut seperti pasang surut, perembesan air asin dan angin laut¹⁵.



¹³ <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>, diunduh tanggal 3 Juli 2022 pukul 21.09 WIB

¹⁴ <https://kbbi.web.id/salinitas>, diunduh tanggal 6 September 2022 pukul 22.45 WIB

¹⁵ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf>, diunduh tanggal 23 Mei 2022 pukul 15.05 WIB

BAB - II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Agar tulisan dapat dipertanggungjawabkan maka analisa pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir maka harus dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperkuat dengan kerangka teori serta dapat dijabarkan analisa tersebut dengan menggunakan pisau analisis yang benar. Data dan fakta dapat memberikan gambaran kondisi nyata yang terjadi di masyarakat wilayah pesisir sehingga akan didapat diambil langkah yang tepat untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Hal lain yang tidak dapat dilupakan adalah perkembangan lingkungan strategis yang berkembang baik secara global, regional di kawasan maupun perkembangan yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis memberikan pengaruh dalam mencari solusi permasalahan yang ada di masyarakat wilayah pesisir.

8. Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sudah tertuang pada pasal 74 yaitu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial ini bersifat timbal balik yaitu memberikan keuntungan perusahaan dan juga bagi komunitas setempat. Dari kegiatan tersebut dapat maka dapat diperoleh kemanfaatan bagi pemerintah sehubungan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat yang merata, adil dan juga berkelanjutan yang berdasarkan kepada kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Untuk

mewujudkan ketersediaan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, bergizi dan aman baik pada tingkat nasional sampai dengan perorangan yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal adalah kewajiban negara. Pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatur perencanaan pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah harus melibatkan peran masyarakat. Pada pasal 12 ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Pasal 16 menjelaskan tentang pengembangan potensi produk pangan lokal melibatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana prasarana pangan dan kelembagaan pangan.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat penyelenggaraan pemberdayaan dan peran serta masyarakat diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada pasal 12 ayat 2 butir g menyatakan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir yang ada di wilayah kerjanya.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan sumber kekayaan alam perlu menjaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat wilayah pesisir untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam yang banyak terkandung di wilayah pesisir. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberi izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir. Pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir

memanfaatkan sumber daya yang ada difasilitasi oleh pasal tersebut. Pada pasal 63 ayat 1 menyiratkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pada pasal 63 ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat dengan melalui peningkatan kapasitas, memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi, infrastruktur, permodalan, jaminan pasar serta ekonomi yang produktif lainnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewajiban sosial terhadap setiap Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap Perseroan yang berbadan hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan tersebut melengkapi Undang-undang nomor 40 tahun 2007 sehingga semua Perseroan Terbatas wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, bukan hanya perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung jawab sosial akan diancam sesuai undang-undang yang berlaku.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah, penganeekaragaman pangan, kesiapan krisis pangan dan peran serta masyarakat. Pasal 25 menyatakan bahwa Penganeekaragaman pangan dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis kepada pemanfaatan potensi lokal untuk memenuhi konsumsi yang beragam dan seimbang, mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 26 ayat 2 menjelaskan keterlibatan perguruan tinggi, pelaku usaha pangan lokal dalam pengembangan penganeekaragaman pangan berbasis pangan lokal.
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembangunan Nasional jangka menengah tahun 2020-2024 yang dilaksanakan oleh

pemerintah mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan, hal tersebut tertuang sebagai satu dari sembilan misi pemerintah yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sembilan Misi pemerintah dijabarkan dalam tujuh agenda pembangunan. Agenda untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang akan dipacu agar dapat tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan. Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia pertanian serta kepastian pasar.

- h. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa Badan ini didesain lintas sektor sehingga permasalahan pangan pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN dilimpahkan kepada Badan Pangan Nasional¹⁶. Kementerian Pertanian mendelegasikan tugasnya terkait kebijakan cadangan yang dikelola oleh BUMN. Kementerian BUMN mendelegasikan pengelolaan Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan mendelegasikan kewenangan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Badan ini bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, kerawanan pangan, stabilitas pasokan pangan dan harga pangan. Pasal 4 menjelaskan tentang jenis pangan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pangan Nasional adalah beras, jagung, kedelai, bawang, gula konsumsi, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, dan cabai.

¹⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20220221/15/1502878/dipimpin-arief-prasetyo-adi-apa-itu-badan-pangan-nasional>, diunduh tanggal 21 Mei 2022 pukul 21.05 WIB

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori manajemen.

Manajemen dipergunakan jika ingin mencapai sasaran yang tepat dan dengan dilakukan melalui pentahapan yang benar. Metode manajemen untuk menyelesaikan masalah telah dikembangkan oleh Walter Shewhard, hal ini dilaksanakan untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan. W. Edwards Demings telah mengembangkan siklus PDCA (*Plan Do Check Act*/Rencanakan, kerjakan, Cek, Tindaklanjuti) yang kemudian dikenal dengan siklus Demings atau siklus kendali. Hal tersebut membuat arah tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan baik, terkontrol dan berkelanjutan¹⁷.

Semua fase pada siklus PDCA saling berhubungan dan mudah dipahami serta memberikan efektivitas dalam membuat perubahan, menyelesaikan masalah dan efisiensi waktu. Pada fase *Plan* (Perencanaan) harus melaksanakan identifikasi masalah dengan teknik 5W (*What, Who, When, Where dan Why*) dan membuat hipotesa untuk proses berikutnya dengan memastikan pemahaman terhadap masalah yang diselesaikan, sumber daya yang tersedia, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan solusi pemecahan masalah dan parameter keberhasilan. Pada fase *Do* (Kerjakan) harus melaksanakan semua hal yang telah direncanakan pada tahap *Plan* pada skala kecil. Hal ini membuat kendala yang ditemui pada tahap *Do* dapat dikendalikan karena masih dalam skala kecil. Keberhasilan tahap *Do* ditentukan dengan disiplin melaksanakan aksi sesuai parameter dalam perencanaan. Pada fase *Check* (Cek) aksi yang dilakukan adalah melaksanakan audit eksekusi apakah sudah sesuai dengan rencana atau menemui kendala di lapangan. Proses *Do* dan *Check* dapat dilakukan berulang-ulang untuk menuju hasil yang maksimal. Pada fase *Act* (Tindaklanjuti) seluruh tahapan yang sudah diperbaiki dari *Do* dan *Check* dilaksanakan namun seluruh tahapan akan terus berulang. Jika

¹⁷ <https://glints.com/id/lowongan/pdca-adalah/#.Yzz5rOxBxQI>, diunduh tanggal 5 Oktober 2022 pukul 10.55 WIB

telah melewati fase *Act* maka komitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu akan terwujud¹⁸.

Pemberdayaan masyarakat pesisir harus dilaksanakan dengan terencana tidak hanya oleh komponen pemerintah saja, namun dengan melibatkan seluruh elemen seperti lembaga pendidikan, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak serta roda perekonomian akan berjalan dengan baik. Dengan perencanaan yang baik kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di suatu wilayah. Potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dapat dipilah-pilah dan direncanakan pemberdayaannya sesuai dengan karakteristik yang ada di wilayah pesisir karena pasti berbeda penanganannya dengan wilayah lainnya. Kegiatan akan berjalan sesuai dengan rencana jika kontrol dilakukan secara terencana dan periodik.

b. Teori SWOT.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir penulis menggunakan teori SWOT untuk melihat faktor-faktor yang hadir dalam masalah tersebut. Penggunaan teori SWOT merupakan pisau analisis untuk menentukan strategi dan penyelesaian masalah secara efektif. Teori SWOT mempertimbangkan empat faktor yaitu faktor internal berupa *Strengths* (Kekuatan) yaitu seberapa jauh kekuatan yang dimiliki dan *Weakness* (Kelemahan) untuk melihat kelemahan yang kita miliki. Faktor eksternal berupa *Opportunities* (Peluang) yaitu seberapa banyak peluang yang dapat kita manfaatkan untuk pelaksanaan pemberdayaan dan *Threats* (ancaman) adalah faktor-faktor yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Tujuan utama perencanaan strategis tersebut adalah

¹⁸ <https://accurate.id/marketing-manajemen/pdca-adalah/>, diunduh tanggal 5 Oktober 2022 pukul 11.59 WIB

agar kita dapat melihat secara obyektif kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal¹⁹.

c. Teori Pemberdayaan.

Mubarak (2010) mengatakan bahwa "*pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas agar dapat mampu untuk berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka di dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat*". Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan dua arah yaitu keluar untuk melepaskan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, ke dalam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menjaga ketahanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan²⁰. Pemberdayaan masyarakat ditujukan agar potensi yang ada di wilayah pesisir dapat dijadikan sarana bagi masyarakat dengan bimbingan dari pemerintah untuk menghasilkan manfaat yang positif baik dalam menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan maupun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah tersebut.

Pemberdayaan harus melihat potensi yang dimiliki wilayah pesisir tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengolah potensi tersebut sesuai dengan konsep ekonomi hijau, tidak merusak lingkungan dan dapat berkelanjutan. Karakter masyarakat wilayah pesisir yang ulet merupakan modal dalam pemberdayaan, pelaksanaan pendampingan dapat menjadi sarana untuk memantau perkembangan dan solusi memecahkan masalah jika menemui kendala yang ditemui di lapangan.

¹⁹ Freddy Rangkuti. 2013. "Analisis SWOT, cara perhitungan bobot, rating dan OCAI". 3. Jakarta. PT Gramedia.

²⁰ <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>, diunduh tanggal 9 April pukul 20.30 Wib.

10. Data dan Fakta.

Yang terlihat menonjol pada kondisi masyarakat pesisir adalah masalah kemiskinan. Data yang didapat dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah pesisir mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang tinggal pada daerah lain. Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 wilayah di pesisir mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan (419.309 jiwa), Kabupaten Tuban (388.176 jiwa), Kabupaten Gresik (505.499 jiwa), Kabupaten Sumenep (400.960 jiwa), Kabupaten Banyuwangi (387.084 jiwa)²¹. Di Provinsi Jawa Tengah pada daerah di wilayah pesisir angka kemiskinan juga tinggi seperti di Kabupaten Rembang (101.400 jiwa), Kabupaten Tegal (100.000 jiwa), Kabupaten Brebes (315.000 jiwa), Kabupaten Cilacap (201.700 jiwa), Kabupaten Purworejo (88.800 jiwa), Kabupaten Kebumen (212.900 jiwa)²². Pada Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten di wilayah pesisir mempunyai angka kemiskinan tinggi seperti di Kabupaten Selayar Kepulauan (16.930 jiwa), Kabupaten Bone (79.650 jiwa), Kabupaten Wajo (26.220 jiwa), Kabupaten Pakajene Kepulauan (48.4000 jiwa), Kabupaten Luwu (46.26 jiwa)²³.

Pada rapat koordinasi (rakor) percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir yang dipimpin oleh wakil Presiden Ma'ruf Amin yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2021 di Istana Wakil Presiden menghasilkan keputusan bahwa pada tahun 2022 pemerintah akan melaksanakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 Kabupaten/kota, dan ternyata 147 tempat atau 69,34% wilayah kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik, karena merupakan pertemuan antara dua ekosistem yaitu ekosistem laut dan ekosistem darat. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam baik yang berada di laut maupun di darat untuk dapat memenuhi kebutuhan

²¹ BPS. 2021. Profil kemiskinan Kabupaten Tuban 2021.16. BPS Kabupaten Tuban

²² BPS.2022. Beberapa indikator makro social ekonomi Provinsi Jawa Tengah edisi April 2022.10. BPS Jawa Tengah

²³ BPS. 2021. Data dan informasi kemiskinan Sulawesi Selatan 2021.14. BPS Sulawesi Selatan

manusia. 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, dan 300 Kabupaten dari 514 Kabupaten berada di wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki keunggulan yaitu dekat dengan akses transportasi laut sehingga mempunyai peluang dalam pemasaran hasil usaha²⁴. Potensi wilayah pesisir sangat besar untuk dikembangkan di bidang pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dengan program yang tepat dan dengan pendampingan yang terus menerus sehingga perkembangan dapat diikuti serta permasalahan dapat diberikan solusi yang terbaik.

Keberhasilan wilayah pesisir untuk pertanian di Indonesia telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap yang berada di pesisir Selatan Jawa telah berhasil mengembangkan pertanian di wilayah pesisir yang berbatasan dengan laut. Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman berhasil mengembangkan pertanian di lahan lumpur pada daerah dengan salinitas tinggi akibat pengaruh rob air laut. Penggunaan varietas unggul padi salin seperti Inpari 74, Inpari 79, Dendang, Inpari 42 merupakan varietas tahan air laut berhasil di budidaya pada lahan dengan salinitas tinggi dengan hasil produksi padi tidak ketinggalan dari daerah lain²⁵. Keberhasilan Kabupaten Cilacap dalam pengembangan pertanian di wilayah pesisir menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai daerah penghasil padi tertinggi secara nasional tingkat Kabupaten/kota tahun 2019-2020. Atas prestasi tersebut Kabupaten Cilacap mendapat penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021²⁶.

Keberhasilan pengembangan pertanian di wilayah pesisir lainnya juga telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang telah mengubah lahan berpasir dan tandus di pantai selatan Yogyakarta menjadi lahan pertanian yang subur dengan melaksanakan pertanian di lahan berpasir. Tanaman hortikultura seperti sayur mayur, cabai, semangka, terong,

²⁴ Dr. Yonvitner dkk. Pengelolaan wilayah pesisir.7. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf>, diunduh tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.07 WIB

²⁵ <http://dispertan.cilacapkab.go.id/2020/07/30/dispertan-sosialisasikan-pengembangan-padi-salin/>, diunduh tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.21 WIB

²⁶ <https://cilacapkab.go.id/v3/kabupaten-cilacap-raih-penghargaan-abdi-bakti-tani-2021/>, diunduh tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.50 WIB

kacang panjang, melon dan tanaman lainnya berhasil dibudidayakan. Bahkan dengan penanaman yang baik hasil pertanian seperti cabai dapat lebih sering panen dibanding daerah lainnya, jika umumnya panen cabai delapan kali petik dalam 1 tahun maka di daerah selatan Yogyakarta dapat dipetik sebanyak 15 sampai 20 kali petik²⁷. Keberhasilan tersebut membuat Kabupaten Kulon Progo menjadi penyangga pasar sayur-mayur di wilayah Yogyakarta, bahkan bisa menembus pasar di luar negeri. Hal tersebut adalah hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Universitas Gajah Mada.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis.

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis memberikan pengaruh dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Dampak dari pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini masih dirasakan di dunia, demikian pula dengan kondisi yang terjadi di tingkat global, regional dan nasional. Untuk dapat mengetahui perkembangan tersebut disajikan data-data sebagai berikut:

a. Global.

Perubahan iklim yang terjadi secara global membawa perubahan ekosistem dunia yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan. *Intergovernmental Planet on Climate Change* (IPCC) menyatakan perubahan iklim bukan akibat dari proses alami tetapi akibat dari aktivitas manusia seperti, deforestasi, besarnya urbanisasi, aktivitas industri²⁸. Para ahli menyatakan bahwa perubahan iklim akan semakin buruk dengan peningkatan suhu yang mengakibatkan kerusakan lapisan ozon berdampak akan banyak pulau yang tenggelam seiring dengan kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di Kutub bumi. Perubahan iklim juga menyebabkan perubahan curah hujan dan kemarau akibat pengaruh fenomena *El Nino* dan *La Nina*. Hal ini menyebabkan perubahan pola tanam pada sektor pertanian yang harus

²⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengubah-nasib-lewat-bertani-di-lahan-pasir-pesisir.html>, diunduh tanggal 28 Agustus 2022 pukul 21.34 WIB

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_iklim_dan_pertanian#:~:text=Perubahan%20 iklim%20 akan%20menyebabkan%20kekeringan,yang%20merusak%20426.000%20hektare%20sawah., diunduh tanggal 17 Juni 2022 pukul 09.52 WIB

disikapi dengan cermat untuk menghindari gagal panen dan ancaman kekeringan serta kelaparan. Bagi masyarakat pesisir kondisi demikian mengancam kehidupan mereka karena dengan peningkatan permukaan laut maka akan mengancam kehidupan di wilayah pesisir.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan melahirkan *Millenium Development Goals* (MDGs)/ Tujuan pembangunan milenium, terdapat 8 tujuan MDGs yaitu (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Negara berkembang wajib melaksanakan MDGs dan negara maju wajib membantu negara berkembang.

Pada tahun 2015 disepakati untuk meneruskan program MDGs dalam agenda lanjutan yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan 17 tujuan dan 169 target dengan rentang waktu agenda pada tahun 2016 sampai tahun 2030. SDGs dilaksanakan untuk menghilangkan masalah sosial ekonomi sampai tidak ada warga yang ketinggalan. SDGs melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, sektor bisnis dan swasta, pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya. SDGs berpedoman kepada 5 P yaitu (1) *People*/Manusia yaitu manusia sebagai perhatian untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, (2) *Planet*/Bumi yaitu melindungi bumi dari kerusakan dengan pengelolaan semua sumber daya secara berkelanjutan, (3) *Prosperity*/kesejahteraan yaitu pembangunan harus memberikan kehidupan yang layak dan sejahtera atau keselarasan dengan alam, (4) *Peace*/Perdamaian yaitu terbinanya perdamaian dan keadilan, terbangunnya masyarakat inklusif bebas dari ketakutan dan kekerasan, (5) *Partnership*/Kemitraan yaitu implementasi pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan dan kolaborasi berbagai pihak serta dunia internasional. Tiga pilar SDGs adalah (1) pembangunan

manusia/*human development* seperti pendidikan dan kesehatan, (2) lingkungan sosial ekonomi/*Social economy development* seperti pertumbuhan ekonomi dan sarana prasarana lingkungan, (3) Lingkungan/*Enviromental Development* yaitu kualitas lingkungan yang baik dan ketersediaan sumber daya alam²⁹.

Konflik yang terjadi di Eropa yaitu perang antara Rusia dan Ukraina sejak 24 Februari 2022 sampai dengan saat ini membawa dampak bagi dunia mengingat Rusia dan Ukraina merupakan sumber energi dan pangan dunia. Perang Rusia dan Ukraina membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia di mana akibat krisis pangan dan energi dunia membuat harga melambung tinggi. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau Organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 sebesar 3 persen akibat krisis kemanusiaan sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina³⁰. Jika perang Rusia-Ukraina berlarut dalam jangka waktu yang lama akan semakin mengancam terhadap kestabilan pangan dunia.

b. Regional.

Pertumbuhan penduduk di Asia relatif tinggi dibanding benua lain yaitu rata-rata dua persen dan jumlah penduduk di Asia merupakan yang terbesar dibanding benua lain³¹. Negara-negara di Asia telah mengembangkan teknologi pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya, apalagi dihadapkan dengan situasi keamanan global yang tidak menentu seperti konflik di Eropa membuat harga-harga melambung tinggi dan jalur distribusi pangan dunia menjadi terganggu.

Kerjasama pertanian dalam kerangka ASEAN + 3 (China, Jepang dan Korea Selatan) pada pertemuan *ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry Plus Three* ke 17 (17th AMAF+3) 28 sd 29 September 2017.

²⁹ <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/dari-mdgs-ke-sdgs/>, diunduh tanggal 31 Agustus 2022 pukul 22.34 WIB

³⁰ <https://money.kompas.com/read/2022/06/10/073325126/akibat-perang-rusia-ukraina-oecd-proyeksi-ekonomi-global-tahun-ini-hanya-3> diunduh tanggal 14 Juni pukul 20.53 WIB

³¹ <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/dinamika-penduduk-benua-benua-di-dunia-8464/>, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.21 WIB

menyepakati rencana strategis kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan untuk periode pada tahun 2016-2025. Kerjasama tersebut sebagai upaya menjamin keamanan pangan, mempromosikan pembangunan pertanian dan kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan perdagangan di negara-negara ASEAN *Plus Three*. Para Menteri Pertanian dalam pertemuan itu juga menyetujui rencana perpanjangan perjanjian ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) selama 5 tahun yaitu pada 2018-2022. APTERR merupakan skema kerjasama ASEAN dengan *Plus Three* untuk memperkuat ketahanan pangan dan saling membantu jika negara anggota berada dalam kondisi darurat atau tertimpa bencana alam³².

Negara China yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia yaitu 1,43 miliar jiwa, menuntut negara tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan pangan warganya. Sejak empat dekade lalu pemerintah China melaksanakan revolusi industri yang membawa perubahan dalam dunia pertanian di China untuk memproduksi beras dan gandum menjelma menjadi industri yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mewah yaitu daging babi dan susu. Pertumbuhan industri di China dengan pembangunan pabrik tinggi berdampak tingkat pencemaran tinggi berimbas pada hasil pertanian yang tercemar. Dampak pencemaran berupa beras yang mengandung merkuri, sayur-mayur yang terpapar logam dan susu yang terinfeksi melamin. China menghabiskan dana yang besar dalam investasi untuk pengairan dan perbaikan kerusakan alam, pembenihan, penggunaan robot dalam pertanian. China berambisi menjadi lumbung pangan bagi 9 miliar penduduk dengan membeli dan menyewa lahan negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. China membidik negara yang belum banyak mengolah lahannya seperti Mozambik untuk memenuhi kebutuhan gandumnya sehingga pada tahun 2021 cadangan gandum China sudah lebih dari 600 juta ton³³. Pendekatan China di

³² <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2260>, diunduh tanggal 27 Agustus 2022 pukul 19.04 WIB

³³ <https://internasional.kontan.co.id/news/ambisi-china-jadi-lumbung-pangan-terbesar-dunia>, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.54 WIB

Indonesia di bidang pertanian terlihat dari kerjasama pengembangan sektor pertanian dan membeli hasil pertanian Indonesia. Kerjasama dengan China harus dapat dimanfaatkan dalam pengembangan “beras air laut” di mana pada tahun 2021 China sudah berhasil mengembangkan 40.000 hektar pertanian air laut³⁴.

Jepang selain dikenal dengan kemajuan teknologi, perkembangan pada sektor pertanian juga sudah sangat maju. Keterbatasan tenaga petani telah membuat pemerintah Jepang mengembangkan digital farming dengan berbasis kepada *Artificial intelligent (AI)*, *internet of Thing (IoT)* dan *Big data* untuk menjaga ketahanan pangannya. Penggunaan robot dapat menggantikan tugas petani secara cepat dan penggunaan satelit untuk memantau pengairan secara tepat waktu. AI dimanfaatkan untuk memberikan info kepada petani terkait penggunaan bibit dan menjaga kualitas hasil panen. AI dan IoT dipergunakan dalam meningkatkan teknik *fertigation* yaitu mengatur penggunaan pupuk dan air agar tanaman dapat tumbuh dengan jumlah yang cukup. Cara ini dapat menjaga ketersediaan air karena penggunaan air yang berlebihan dapat diiadakan³⁵. Kebijakan sektor pertanian di Jepang dengan mengontrol jenis tanaman pertanian yang ditanam dan kontrol harga yang ketat serta kemudahan kepemilikan lahan untuk sektor pertanian menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang stabil. Hal tersebut membuat ketahanan pangan Jepang tetap terjaga walaupun lahan pertanian terbatas.

Thailand berhasil mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan yaitu pertanian yang mengembangkan sumber daya yang dapat diperbaharui dan menekan dampak lingkungan seminimal mungkin. Lahan pertanian Thailand kurang subur dibandingkan Indonesia, Thailand berhasil merekayasa kondisi pantai yang terdegradasi karena erosi dan berbatu menjadi lahan pertanian yang subur. Sejak tahun 1998 Thailand merestorasi lahan dan reboisasi

³⁴ <https://pertanian.sariagri.id/96649/cina-luncurkan-beras-air-laut-skala-besar-untuk-tingkatkan-produksi>, diunduh tanggal 23 Juli 2022 pukul 19.05 WIB

³⁵ <https://www.disrupto.co.id/journal/jepang-gencarkan-digital-farming-untuk-jaga-ketahanan-pangan>, diunduh tanggal 23 Juli 2022 pukul 21.02 WIB

dengan melaksanakan penanaman **rumpuk vetiver** yang mempunyai kemampuan dapat menghancurkan batu dan memiliki perakaran luas, menyimpan dan menyerap air pada musim hujan dan meningkatkan mikroorganisme yang membantu menghancurkan batu. Tiga tahun setelah penanaman rumput lahan tersebut siap ditanami. Rumput tersebut diimpor secara besar-besaran dari Indonesia karena tidak ada di Thailand. Pertanian di Thailand berhasil menggunakan sistem pertanian organik memanfaatkan dedaunan dan kotoran ternak untuk diolah menjadi kompos tanpa menggunakan bahan kimia maupun pestisida kimia. Pupuk kompos mampu meningkatkan aktivitas organisme tanah dan mempertahankan kesuburan tanah yang ditanami berbagai tanaman sayuran, buah-buahan seperti pisang, pepaya, belimbing, jambu bengkak, kelapa dan tumbuhan lainnya. Keberhasilan Thailand dalam sektor pertanian dengan kesuburan tanah yang terbatas membuat negara tersebut dikenal sebagai "*Kitchen of the World*"³⁶.

c. Nasional.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 telah memukul semua sektor dan memukul perekonomian Indonesia, sektor swasta terpuak dan banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berdampak dengan pemutusan hubungan kerja. Yang menarik adalah ternyata sektor pertanian pada saat pandemi Covid-19 justru mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pertanian berkontribusi terhadap nilai ekspor negara sebesar 3%. Ini menjadi peluang dalam mengembangkan potensi pertanian di Indonesia yang telah terbukti tahan menghadapi tekanan saat sektor lainnya terpuak.

Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2022 berjumlah 275, 773 Juta jiwa³⁷ dengan pertumbuhan penduduk 1,17% termasuk tinggi dan merupakan negara nomor empat terpadat

³⁶ <http://faperta.unisma.ac.id/negara-gajah-putih-dan-the-kitchen-of-the-world/>, diunduh tanggal 31 Juli 2022 pukul 20.02 WIB

³⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diunduh tanggal 24 Juli 2022 pukul 21.32 WIB

penduduknya di dunia³⁸. Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi masalah jika penduduk usia kerja yang produktif terfokus kepada sektor industri. Sektor pertanian berpotensi menampung tenaga kerja yang melimpah. Indonesia harus belajar dari negara yang lebih maju dalam sektor pertanian baik dalam melakukan pembinaan petani, pemanfaatan teknologi pertanian maupun dalam menjamin keamanan harga dan industri pengolahan hasil pertanian serta kesejahteraan sektor pertanian agar generasi muda tertarik kepada sektor pertanian. Permasalahan mafia pupuk dan permainan harga merupakan masalah yang harus dapat dipecahkan untuk memajukan sektor pertanian.

Penyediaan pangan di Indonesia mendapat tantangan dengan penyusutan lahan pertanian. Data dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2020, pencatatan luas panen padi mengalami penurunan 0,19 persen dibanding dengan luas panen padi pada tahun 2019 yaitu 10,68 juta Ha (menyusut 20,61 ribu Ha) menjadi 10,66 juta Ha,³⁹. Pada tahun 2021 penyusutan lahan juga terjadi sebesar 0,14 juta Hektar atau sebesar 1,33 persen menjadi 10,52 juta Ha⁴⁰. Penyusutan lahan terpantau telah berjalan lebih dari 10 tahun terjadi akibat alih fungsi lahan menjadi daerah industri atau fasilitas penunjang lainnya seperti perumahan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah karena akan terjadi kekurangan pemenuhan konsumsi pangan penduduk Indonesia seiring dengan pertumbuhan penduduk dan akan menjadi masalah di masa yang akan datang.

Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional pada tahun 2021 untuk menyederhanakan permasalahan pangan nasional. Badan Pangan Nasional menerima sebagian kewenangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN, diharapkan penanganan permasalahan pangan nasional dapat lebih fokus. Badan Pangan Nasional didesain lintas sektor membuat

³⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, diunduh tanggal 25 Juli 2022 pukul 17.02 WIB

³⁹ <https://bisnisnews.id/detail/berita/produktifitas-pangan-dan-penyusutan-lahan-pertanian-di-Indonesia>, diunduh tanggal 3 April 2022 pukul 16.25 Wib

⁴⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211015/12/1454724/bps-sebut-potensi-luas-lahan-panen-padi-menyusut-014-juta-tahun-ini>, diunduh tanggal 12 April 2022 pukul 21.06 Wib

Kementerian Pertanian mendelegasikan tugasnya terkait kebijakan cadangan yang dikelola oleh BUMN. Kementerian BUMN mendelegasikan pengelolaan Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan mendelegasikan kewenangan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Badan ini bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, kerawanan pangan, stabilitas pasokan pangan dan harga pangan. Jenis pangan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pangan Nasional adalah beras, jagung, kedelai, bawang, gula konsumsi, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, dan cabai⁴¹.

Tentara Nasional Indonesia melaksanakan pembinaan teritorial kepada masyarakat sebagai bentuk kemandirian TNI-Rakyat. Sejak tahun 2015 Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI untuk membantu percepatan produksi pangan nasional. Pembinaan teritorial TNI dilaksanakan pada satuan kewilayahan TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Pelibatan TNI dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian⁴². Menteri Pertahanan melalui Permenhan nomor 1 tahun 2022 menekankan agar satuan-satuan TNI menyiapkan kantong-kantong logistik untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program teritorial TNI dalam pembinaan teritorial merupakan program intern TNI, belum terpadu di semua daerah dengan pemerintah daerah.

d. Peluang dan kendala.

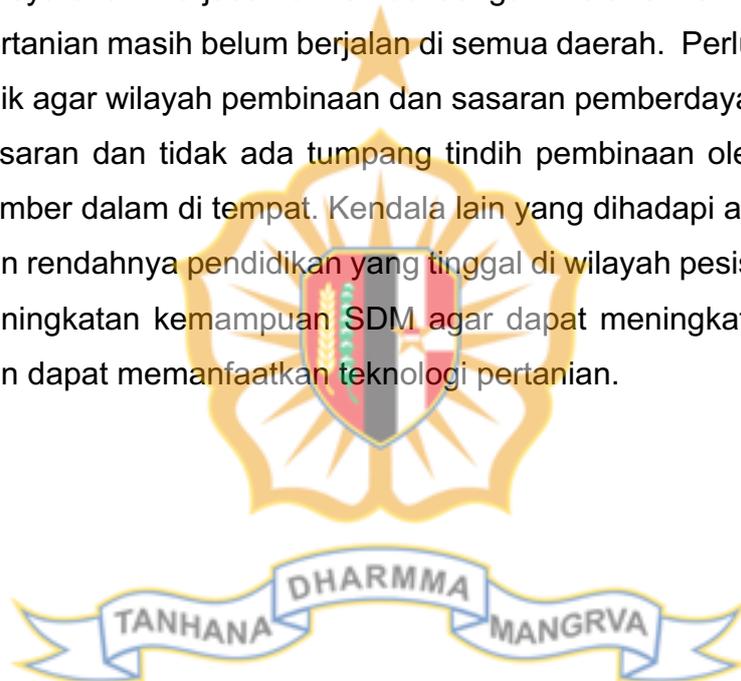
Peluang yang dapat diambil dari uraian di atas adalah kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan TNI untuk pengembangan pertanian di wilayah pesisir dengan melibatkan lembaga pendidikan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi pertanian. Pemerintah dapat mencontoh keberhasilan pertanian di China, Jepang dan Thailand untuk dikembangkan pada pertanian di wilayah pesisir sehingga pertanian dengan varietas padi tahan air akan semakin berkembang dan pertanian di wilayah pesisir dapat menjadi solusi semakin menyusutnya lahan

⁴¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-resmi-bentuk-badan-pangan-nasional-ini-tugasnya>, diunduh tanggal 3 Juli pukul 16.07 WIB

⁴² <https://www.forestdigest.com/detail/1570/tentara-cetak-sawah>, diunduh tanggal 3 Juli 2022 pukul 21.05 WIB

subur di wilayah lain. Pembentukan Badan Pangan Nasional memberikan kepastian akan penyaluran hasil pertanian. Jumlah tenaga kerja yang besar sebagai bonus demografi dapat diserap pada sektor pertanian, Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan hasil pertanian dan menarik generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian.

Adapun kendala yang ditemui adalah perubahan iklim yang terjadi mempengaruhi pola tanam, masa tanam dan waktu tanam dalam sektor pertanian. Perubahan musim membuat perubahan dalam sektor pertanian yang mengancam gagal panen dan kekurangan pangan bagi masyarakat. Kerjasama Pemda dengan instansi vertikal dalam bidang pertanian masih belum berjalan di semua daerah. Perlu kerjasama yang baik agar wilayah pembinaan dan sasaran pemberdayaan menjadi tepat sasaran dan tidak ada tumpang tindih pembinaan oleh lebih dari satu sumber dalam di tempat. Kendala lain yang dihadapi adalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang tinggal di wilayah pesisir sehingga perlu peningkatan kemampuan SDM agar dapat meningkatkan kemampuan dan dapat memanfaatkan teknologi pertanian.



BAB - III PEMBAHASAN

12. Umum.

Dalam membahas bagaimana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir, harus memperhatikan sejumlah aspek yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Pembahasan berpegang kepada tiga aspek utama dalam taskap ini yaitu regulasi dan perundang-undangan yang terkait, kerangka teori dan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Pada Bab ini akan membahas kondisi masyarakat yang ada di wilayah pesisir, potensi ekonomi hijau yang dapat dimanfaatkan pada bidang pertanian dan upaya pemanfaatan potensi tersebut guna mewujudkan ekonomi hijau. Pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di bidang pertanian dapat memecahkan masalah yang utama masyarakat wilayah pesisir yaitu masalah kemiskinan⁴³. Potensi Pertanian dikembangkan melibatkan instansi vertikal, pemanfaatan CSR dari pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk dapat melakukan pendekatan ilmiah sehingga pengolahan lahan dapat memberikan hasil yang maksimal. Sinergi semua *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat akan memberikan hasil yang maksimal. Wilayah pesisir mempunyai keuntungan terkait kemudahan akses dengan kegiatan ekonomi lainnya seperti transportasi, pelabuhan, industri dan pemukiman sehingga memudahkan dalam distribusi hasil pertanian.

13. Kondisi Masyarakat di wilayah pesisir.

Kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dapat dilihat dari ciri dan karakter masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kondisi alam di wilayah pesisir sebagai pertemuan antara ekosistem darat dan laut yang dinamis pasti berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Watak masyarakat yang keras dan terbuka, permasalahan kemiskinan dan pendidikan yang rendah jika tidak ditangani dengan bijak akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah.

⁴³ <https://bisnis.tempo.co/read/447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diunduh tanggal 18 Juli 2022 pukul 17.20 WIB

a. Ciri dan karakter masyarakat pesisir

Wilayah pesisir adalah tempat bertemunya ekosistem darat dan laut sehingga kehidupan baik di darat maupun di laut saling mempengaruhi dan perubahan selalu terjadi secara dinamis. Kondisi ini membuat masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berkarakter keras dan dapat menyesuaikan setiap perubahan alam. Profesi masyarakat di wilayah pesisir sebagian besar adalah nelayan, petani tambak dan pegawai. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan bergelut dengan laut dengan penghasilan yang tidak dapat dikontrol dan hidup berpindah mengikuti musim. Kondisi sumber daya yang berisiko membuat karakteristik masyarakat keras, tegas dan terbuka. Kondisi yang demikian membuat tidak sedikit nelayan yang merangkap sebagai petani karena ditunjang dengan kondisi alam yang memungkinkan membuka lahan pertanian. Pada musim-musim tertentu nelayan ke laut dan pada musim lainnya mereka bertani. Ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi ekologi yang mereka hadapi⁴⁴. Ciri masyarakat pesisir yang dapat menyesuaikan dengan setiap perubahan lingkungan pesisir dan pekerja keras serta terbuka merupakan modal penting dalam pemberdayaan masyarakat ke arah pertanian yang memberikan kepastian hasil yang dan memberi jaminan perekonomian yang lebih baik.

b. Kondisi ekonomi.

Permasalahan yang paling menonjol di wilayah pesisir adalah kemiskinan. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa kemiskinan masyarakat wilayah pesisir 4,19% lebih tinggi dari rata-rata nasional dan dari jumlah masyarakat miskin ekstrem nasional sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 % ada pada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yaitu 1,3 juta jiwa⁴⁵. Wakil Presiden pada rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2021 di istana wakil Presiden menghasilkan keputusan bahwa pada tahun 2022 pemerintah akan

⁴⁴ Arif Satria. 2015. "Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir". 8. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor.

⁴⁵ https://www.setneg.go.id/baca/index/pimpin_rapat_kemiskinan_ekstrem_wapres_sebut_wilayah_pesisir_angkanya_lebih_tinggi_dan_lebih_kompleks, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.08 WIB

melaksanakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 Kabupaten/kota, dan ternyata 147 tempat atau 69,34% wilayah kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir.

Permasalahan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik yaitu rata-rata usia masyarakat miskin adalah usia produktif. Pendidikan masyarakat miskin rata-rata tidak lulus SD. Pekerjaan rata-rata adalah usaha sendiri atau buruh tidak tetap dan masyarakat miskin wilayah pesisir rata-rata mendiami wilayah bantaran sungai yang kumuh, rawan gizi dan kesehatan. Perlu kerja sama antara pemerintah dan lembaga non pemerintah secara terpadu dalam penanganan kemiskinan masyarakat wilayah pesisir. Presiden Joko Widodo menargetkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dengan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.300.000 dan bantuan sembako sebesar Rp.300.000 selama tiga bulan⁴⁶. Masyarakat berada pada garis kemiskinan berarti tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari besaran pengeluaran rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah di mana garis kemiskinan tiap daerah berbeda-beda. Sebagai contoh garis kemiskinan rata-rata nasional bulan September 2021 adalah Rp.486.168/kapita/bulan atau garis kemiskinan per Maret 2022 adalah Rp.505.406/kapita/bulan⁴⁷. Pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja dan melepaskan masyarakat di wilayah pesisir dari garis kemiskinan.

c. Kondisi sosial budaya

Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah tingkat pendidikan yang rendah. BPS pada tahun 2021 menyatakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka harapan lama sekolah anak usia 7 tahun di Indonesia adalah 13,08 tahun atau hampir menyelesaikan Diploma 1. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun adalah

⁴⁶ <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61970dc552d5e/jokowi-targetkan-ri-bebas-dari-kemiskinan-ekstrem-tahun-2024>, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.51 WIB

⁴⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-garis-kemiskinan-meningkat-per-maret-2022>, diunduh tanggal 31 Agustus pukul 20.10 WIB

8,54 tahun atau sampai kelas 9⁴⁸. Pendidikan masyarakat wilayah pesisir di bawah angka-angka tersebut. Penelitian oleh Wahyu pada masyarakat pesisir Kabupaten Tanah laut tahun 2018 angka putus sekolah cukup tinggi, rata-rata anak di sana hanya menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan langsung membantu orang tua. Yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP hanya 8 orang dan sampai tingkat SMA hanya 2 orang. Penelitian oleh Mitra Sumantri tentang pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat tahun 2019 bahwa dari 1.312 penduduk terdapat 159 orang berusia 18 sampai 56 tahun yang sama sekali tidak pernah sekolah dan 110 orang yang tidak tamat SD. Pada usia 7 sampai 18 tahun terdapat 128 orang tidak pernah sekolah. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat. Penelitian oleh Nana Siti Salmania Siregar tahun 2016 di Desa Bulu Jepara terdapat 32,25 % (495 orang) anak usia sekolah yang tidak tamat SD dari 1535 orang anak. Kondisi ini menunjukkan angka putus sekolah juga tinggi pada masyarakat wilayah pesisir Pulau Jawa. Hasil survei oleh mitra Kementerian Pendidikan tahun 2019 menyatakan permasalahan yang membuat rendahnya tingkat pendidikan di wilayah pesisir adalah rendahnya motivasi untuk sekolah, belum tercukupi tenaga pengajar, jam sekolah tidak cocok dengan waktu melaut⁴⁹. Hasil beberapa penelitian di atas menunjukkan faktor ekonomi dan motivasi yang membuat kondisi rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir.

14. Potensi Ekonomi Hijau di wilayah pesisir.

a. Ekonomi Hijau.

Ekonomi hijau mulai dikenal di dunia sejak dicetuskan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2008 dalam upaya untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Gagasan yang dikemukakan

⁴⁸ [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/harapan-lama-sekolah-indonesia-naik-jadi-1308-tahun-pada-2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,menempuh%20pendidikan%20hingga%20Diploma%20I.,](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/harapan-lama-sekolah-indonesia-naik-jadi-1308-tahun-pada-2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,menempuh%20pendidikan%20hingga%20Diploma%20I.,) diunduh tanggal 25 Juli 2022 pukul 19.47 WIB

⁴⁹ M. Aris Syarifudin, dkk. 2019. Pendidikan bagi anak nelayan. 9. Jakarta. Ditjen Dikdasmen Kemendikbudristek.

adalah “*Green Economy*” yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Konsep *green economy* pada awalnya hanya mempertimbangkan masalah makro ekonomi yaitu fokus kepada investasi yang memproduksi produk ramah lingkungan dan pada pertumbuhan lapangan pekerjaan ramah lingkungan (*green job*) serta menyiapkan panduan investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan dari permasalahan kemiskinan dengan tujuan untuk mendorong pembuat kebijakan membuat jajarannya dan sektor swasta mendukung peningkatan ekonomi hijau. Pada perkembangannya konsep *green economy* semakin mendapat perhatian dan dihubungkan dengan tantangan lingkungan global yang saat ini terjadi. Tujuan ekonomi hijau adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau juga dapat memacu pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan tidak hanya membuka peluang ekonomi, tapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang dapat tercipta.

Sektor pertanian berperan penting dalam ekonomi hijau karena pada sektor pertanian ini sumber pangan diproduksi dan menyerap banyak tenaga kerja, dapat dijadikan sebagai mata pencaharian bagi penduduk. Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable farming*) berperan dalam pembentukan ekonomi hijau di Indonesia dan menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Pertanian yang berkelanjutan di wilayah pesisir perlu dikembangkan karena sebagai negara kepulauan bentang wilayah pesisir Indonesia merupakan potensi besar untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan pangan akan meningkat sehingga sektor pertanian selalu menjadi sektor yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ekonomi hijau mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat dan menampung tenaga kerja yang didorong oleh investasi publik dan swasta, mengurangi emisi karbon dan kerusakan lingkungan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dari 17 tujuan SDGs terdapat 8 tujuan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir di bidang pertanian yaitu tujuan ke-1

(masyarakat tanpa kemiskinan), tujuan ke-2 (tanpa kelaparan dengan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan), tujuan ke-3 (kehidupan yang sehat dan sejahtera), tujuan ke-4 (peningkatan kualitas pendidikan), tujuan ke-8 (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan membuka kesempatan kerja yang produktif, layak dan menyeluruh), tujuan ke- 12 (pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan), tujuan ke- 13 (penanganan perubahan iklim), dan tujuan ke-15 (perbaikan ekosistem darat dengan merestorasi ekosistem dan memulihkan degradasi lahan di wilayah pesisir).

b. *Green Growth Economy.*

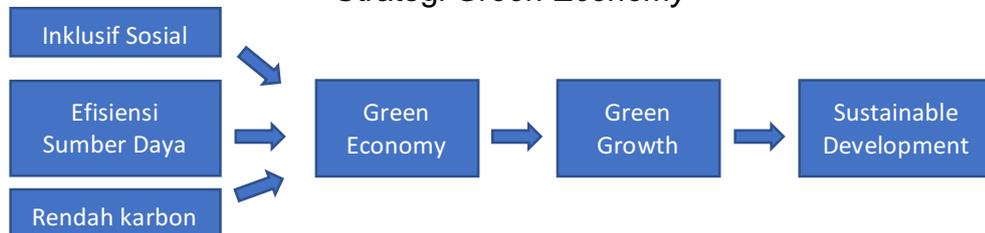
Pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth Development*) menurut Bappenas adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah terhadap lingkungan serta inklusif secara sosial. Pertumbuhan ekonomi hijau berbeda dengan konsep pembangunan secara konvensional yang tidak berkelanjutan serta merusak alam, karena pertumbuhan ekonomi hijau merupakan gerakan yang terkoordinir, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, keberlanjutan serta dengan pelibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara global. Inklusif secara sosial pada pertumbuhan hijau adalah bahwa semua orang di dalam suatu masyarakat dihargai, perbedaan mereka dihargai dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Pertumbuhan hijau memberi akses yang baik dan berkelanjutan terhadap layanan dasar, sumber daya, penciptaan lapangan kerja hijau, pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial.

Pertumbuhan ekonomi hijau dirancang untuk dapat meningkatkan standar kehidupan yang berkelanjutan dan adil serta pendapatan domestik bruto (PDB), membangun infrastruktur yang bersih, menghargai aset-aset alam, menggunakan sumber daya yang efisien⁵⁰. Pemberdayaan masyarakat di pesisir merupakan gerakan yang sesuai dengan *green growth economy* karena ditujukan untuk menurunkan

⁵⁰ <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/#:~:text=Green%20Growth%20atau%20Pertumbuhan%20Ekonomi,lingkungan%2C%20serta%20inklusif%20secara%20sosial.>, diunduh tanggal 28 Agustus 2022 pukul 16.17 WIB

tingkat kemiskinan dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan inklusif secara sosial. Konsep *Green Economy* yang terintegrasi dengan *Green Growth Economy* akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tablel. 1
Strategi *Green Economy*



c. Kondisi Geografis wilayah pesisir.

Wilayah pesisir merupakan peralihan antara darat dan laut dimana wilayah lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, wilayah daratnya masih dipengaruhi oleh aktivitas laut seperti pasang surut, perembesan air asin dan angin laut. Kondisi tersebut membuat wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan saling berinteraksi. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut, maka wilayah pesisir mempunyai keunikan ekosistem. Dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir khususnya pada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Wilayah pesisir cocok untuk pelabuhan, fasilitas industri, pengembangan kota, turisme, penelitian, pertanian dan pembuangan limbah⁵¹.

Wilayah pesisir merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan di berbagai sektor. Panjang pantai Indonesia adalah 108.000 Km dan dengan kekayaan sumber daya alam di dalamnya sangat strategis bagi pengembangan ekonomi. Sebanyak 60% dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir radius 50 km dari garis pantai. Terdapat 514 Kabupaten/kota terdapat di wilayah pesisir merupakan garda terdepan bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

⁵¹ Yonvitnet dkk. Modul pengelolaan pesisir dan pantai. 1.30, diunduh pada <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf> tanggal 4 Mei 2022 pukul 19.05

Perilaku manusia berpengaruh terhadap kondisi lingkungan tersebut. Eksploitasi yang berlebihan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi di daerah pesisir mengakibatkan kerusakan karena tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat seperti pengolahan garam, eksploitasi hutan rawa, penambangan pasir, budi daya ikan, perdagangan dan industri yang tidak terkontrol merupakan contoh yang mempunyai andil bagi kerusakan lingkungan. Dampak akibat eksploitasi berlebihan adalah ancaman ekologi seperti hilangnya lahan, banjir dan kelangkaan air bersih. Kekayaan biota di pesisir terganggu akibat kerusakan lingkungan, tempat hidup aneka hewan dan tumbuhan hilang akibat dari pencemaran dan eksploitasi. Abrasi pantai menggerus pasir pantai akibat hilangnya hutan *mangrove* yang berfungsi sebagai penyangga pantai dari hantaman ombak dan tempat hidup biota di pantai.

d. Potensi ekonomi hijau dan Pemberdayaannya oleh Masyarakat di wilayah pesisir.

Potensi ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat dikembangkan di wilayah pesisir adalah pertanian, wisata bahari, perikanan, listrik tenaga angin. Terkait semakin menyusutnya lahan pertanian akibat perkembangan industri dan kebutuhan pengembangan kota dan perumahan, potensi pertanian masih terbuka lebar di wilayah pesisir. Pertanian di wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang berbeda dari pertanian di wilayah pegunungan atau daratan yang jauh dari laut. Lahan di pesisir pada umumnya adalah lahan lumpur dan lahan pasir atau dikenal dengan istilah tanah regosal yang penanganannya pasti berbeda sehingga jenis tanaman yang dapat ditanam juga berbeda. Hal ini harus diperhatikan agar pertanian di wilayah pesisir tidak mengalami kegagalan.

Pembukaan lahan basah di pesisir membutuhkan penanganan lebih dibanding lahan berpasir karena lahan rawa di pesisir sepanjang tahun tergenang air dangkal dengan ditumbuhi tanaman akuatik dan dasarnya adalah lumpur. Persoalan dalam pembukaan lahan basah yaitu masalah hidrologi (tata air) sehingga pengelolaan hidrologi diperlukan untuk

pematangan tanah, mencegah pengaruh air laut berlebihan yang menggaramkan tanah dan air. Pengelolaan hidrologi dilakukan untuk menjinakkan lahan rawa dari tidak bisa digunakan menjadi dapat digunakan⁵². Salinitas yang tinggi membutuhkan varietas padi yang tahan air asin. Varietas padi tahan air asin juga dapat menjawab permasalahan kenaikan air laut yang membuat lahan pertanian di wilayah pesisir semakin rentan pengaruh air laut. Keberhasilan Petani di Cilacap melaksanakan penanaman varietas padi tahan air asin merupakan bukti potensi pertanian di wilayah pesisir terbuka lebar untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia⁵³. Universitas Jenderal Soedirman berhasil mengembangkan padi varietas Inpari Unsoed 79 yaitu padi tahan air asin. Ini dapat menjadi solusi bagi lahan pertanian di daerah pesisir yang mempunyai salinitas yang tinggi akibat pengaruh air laut. Pengembangan oleh Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman membuat pesisir selatan Cilacap menjadi salah satu lumbung padi nasional. Dengan penemuan tersebut petani dapat melaksanakan penanaman padi selama tiga kali dalam satu tahun. Sebelumnya para petani tidak melaksanakan penanaman pada musim kemarau karena kandungan air asin meningkat. Hasil produktivitas padi pada lahan seluas 65.000 hektar di Cilacap meningkat. Varietas padi tahan air asin dapat menjadi solusi bagi pertanian pesisir yang selama ini terbatas pola tanamnya menyesuaikan musim setiap tahunnya⁵⁴. Keberhasilan China dalam pengembangan padi air asin dapat dijadikan pembandingan selain varietas tahan air asin yang dikembangkan oleh Universitas Jenderal Soedirman. Hal ini karena kondisi wilayah pesisir setiap pulau pasti memiliki karakteristik tersendiri dalam pengembangan lahan pertanian basah. Semakin banyak alternatif bibit padi tahan air asin yang dapat dikembangkan akan meningkatkan ketahanan pangan dan menjadi solusi bagi keterbatasan lahan pertanian di Pulau Jawa.

⁵² KPH Tejiyuwono. 2021. Pengembangan lahan basah rawa dan gambut. 108-109. Yogyakarta. Lily Publisher

⁵³ <https://www.liputan6.com/regional/read/4391135/berkah-padi-tahan-air-asin-untuk-petani-pesisir-cilacap-di-masa-pandemi>, diunduh tanggal 23 Juli 2022 pukul 19.23 WIB

⁵⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4257900/kabar-baik-unsoed-punya-varietas-padi-tahan-air-asin-untuk-pesisir-cilacap>, diunduh tanggal 25 Juli 2022 pukul 21.32 WIB

Lahan pasiran mempunyai ciri kemampuan rendah menahan air, bertekstur kasar. Permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan mulsa atau lapisan plastik untuk mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Pengaruh angin laut yang kencang dapat diatasi dengan penanaman pohon untuk memecah angin dengan pohon kelapa, lamtoro, akasia, sengon, cemara laut. Penggunaan pupuk dapat memanfaatkan kotoran hewan sehingga dapat terpadu dengan peternakan. Keberhasilan Thailand dalam pengolahan lahan pesisir menggunakan pupuk organik tanpa pupuk kimia serta sistem pengairan yang efektif di lahan pesisir dapat menjadi referensi pemerintah untuk diterapkan pada pembukaan lahan di wilayah pesisir Indonesia. Sistem pengairan juga memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan persediaan air tawar. Hidrologi dan pengairan yang baik dapat mengatasi keterbatasan air di wilayah pesisir. Dengan kondisi tanah tersebut berpotensi untuk dikembangkan untuk budidaya sayuran, buah-buahan dan bawang. Keberhasilan pertanian lahan berpasir di pantai selatan Yogyakarta menjadi contoh bahwa lahan pasir dapat dikembangkan pada sektor pertanian yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Universitas Gajahmada bekerja sama dengan Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta mengubah lahan pasir di bekas Sub Terminal Agribisnis Dusun Gadingharjo Desa Srigading Bantul menjadi lahan pertanian yang subur dan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Selatan Yogyakarta. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi pertanian pada lahan pasir yang masih banyak terbengkalai. Pemberdayaan masyarakat tersebut dengan menggerakkan kelompok tani lahan pasir manunggal⁵⁵. Hasil pertanian cabai di lahan tersebut dapat mencapai 20 sampai 25 ton per hektar. Pertanian di lahan pasir sudah dikembangkan di Yogyakarta sejak tahun 1980an membuat lahan di pantai selatan Yogyakarta menjadi produktif, hal ini juga terlihat di Kabupaten Kulonprogo yang mengembangkan tanaman seperti cabai, melon, terong, kacang panjang, semangka dan komoditas sayur mayur

⁵⁵

<https://jogja.suara.com/read/2020/09/16/212127/perjuangan-warga-pesisir-terbayar-sultan-ground-kini-jadi-lahan-pertanian>, diunduh tanggal 27 Juli pukul 19.03 WIB

dengan distribusi hasil panen sampai di luar pulau Jawa yaitu Medan, Batam, Palembang, Jambi dan Lampung menunjukkan besarnya potensi pasar terhadap hasil pertanian tersebut. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh dan diterapkan di wilayah pesisir Indonesia lainnya.

Saat Pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan menghancurkan hampir semua sektor, pemerintah mencatat bahwa sektor pertanian turut andil dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat oleh BPS nilai ekspor pertanian senilai Rp 451,8 Triliun berarti mengalami peningkatan dari tahun 2019. Semakin banyak generasi milenial yang menggeluti dunia pertanian membawa angin segar dengan penggunaan teknologi modern di sektor pertanian. Pemerintah telah menetapkan salah satu strategi utama transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah rencana ekonomi hijau untuk mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan⁵⁶. Peluang ini harus ditangkap untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

15. Upaya pemberdayaan wilayah pesisir.

a. Peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir.

Pemerintah mempunyai tugas untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini juga terhadap masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Soegijanto Soegijoko (1997) menyatakan bahwa *"kemiskinan merupakan situasi yang serba kekurangan dan terjadi bukan merupakan kehendak dari orang miskin tersebut, tetapi karena hal yang tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya"*⁵⁷. Dampak dari kemiskinan adalah tingginya permasalahan sosial yang mengikuti kemiskinan tersebut. Peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat sehingga kemampuan masyarakat menjadi meningkat, membuka lapangan

⁵⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ekonomi-hijau-dorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan/>, diunduh tanggal 24 Juli 2022 pukul 17.05 WIB

⁵⁷ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>, diunduh tanggal 29 Juli 2022 pukul 23.05 WIB

pekerjaan dan melaksanakan pendampingan sehingga kemajuan yang diharapkan selalu dapat terpantau.

1) Peningkatan SDM.

Kemampuan sumber daya manusia menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau usaha. Hal ini harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Tingginya angka penduduk yang tidak bersekolah atau angka putus sekolah membuat masyarakat tidak bisa masuk dunia kerja formal. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang diarahkan kepada bidang pertanian harus menyiapkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, apalagi jika sebelumnya masyarakat belum terbiasa dengan sektor pertanian. Sosialisasi potensi pertanian untuk meningkatkan ekonomi dengan pendekatan menarik perlu dilaksanakan dalam meningkatkan minat masyarakat. Pendekatan dengan diikuti dengan pembagian sembako atau pemberian kemudahan dalam pengurusan dokumen pribadi seperti pengurusan KTP atau kartu miskin dapat dilakukan agar minat masyarakat untuk ikut kegiatan tersebut tinggi. Hal ini penting agar masyarakat sadar dengan potensi pertanian menjadi solusi peningkatan perekonomian mereka.

Keterlibatan Balai pelatihan pertanian atau penyuluh pertanian untuk melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di wilayah pesisir dibutuhkan. Tenaga penyuluh pertanian merupakan tenaga yang terlatih untuk membuka wawasan masyarakat. Pengetahuan yang diberikan berupa cara pengolahan lahan sawah maupun pertanian di lahan berpasir dan pemberian contoh daerah-daerah yang sudah berhasil dalam melaksanakan pertanian di wilayah pesisir dapat memberikan motivasi kepada masyarakat. Pembukaan lahan percontohan di sekitar tempat hidup masyarakat diperlukan karena tempat tersebut menjadi sarana praktik bagi masyarakat sehingga minat untuk bertani meningkat. Kehadiran pemerintah dengan insentif kepada masyarakat dapat memberikan suntikan motivasi masyarakat wilayah pesisir untuk bertani.

2) Penciptaan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja bagi penduduk di wilayah pesisir yang diarahkan pada sektor pertanian adalah dengan pembukaan lahan-lahan pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Masyarakat harus diberi keyakinan bahwa sektor pertanian sudah terbukti dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi yang beberapa kali menghantam Indonesia untuk membuka mata bahwa pekerjaan menjadi petani adalah pekerjaan yang menjamin perekonomian mereka. Sektor pertanian bersifat akomodatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena pada sektor pertanian tidak menuntut persyaratan kerja yang berlebihan. Kesan pertanian yang melekat dengan kemiskinan harus dikikis dengan pemberian contoh usaha pertanian modern yang dijalankan oleh generasi muda, sehingga masyarakat sadar akan potensi besar sektor pertanian yang belum dikembangkan di daerah pesisir. Pengenalan teknologi modern dalam pengolahan lahan dan keterlibatan pihak swasta melalui CSR dapat membangun rasa percaya penduduk akan keberhasilan pengolahan lahan di bidang pertanian.

Masyarakat dikenalkan dengan industri pengolahan hasil pertanian sehingga hasil pertanian yang dijual di pasaran tidak semua dalam bentuk mentah, tapi dapat juga dijual dalam bentuk olahan seperti makanan kecil, buah olahan dan produk saus dan sambal. Ini adalah solusi terhadap kelebihan produksi yang tidak bisa ditampung pasar dalam bentuk segar. Pengenalan teknologi digital dalam pemasaran dan promosi melalui dunia maya dapat meningkatkan kesadaran bahwa sektor UMKM yang berdampingan dan menunjang sektor pertanian masih terbuka lebar untuk dikembangkan dengan pendampingan yang tepat dari pemerintah.

3) Pendampingan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah baik di

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara terpadu memanfaatkan perangkat dalam jajaran pemerintah dan menggandeng instansi vertikal yang ada dalam wilayah tersebut. TNI selama ini telah melaksanakan program teritorial di wilayah satuan-satuan yang tersebar di semua Provinsi. Kerjasama dengan satuan-satuan TNI dapat mengatasi keterbatasan personel dari pemerintah, terutama penyuluh pertanian yang turun langsung ke masyarakat. Demikian pula dengan Polri yang telah melaksanakan pembinaan Kamtibmas ke masyarakat. Pelatihan kepada personel dari TNI/Polri dapat diberikan guna menjadi agen perubahan masyarakat ke arah pertanian.

b. Pemberdayaan potensi ekonomi hijau yang ada di wilayah pesisir.

Potensi ekonomi hijau yang ada di wilayah pesisir Indonesia masih terbentang luas dan belum dikembangkan oleh pemerintah. Penyusutan lahan pertanian subur terutama di pulau Jawa akibat kebutuhan lahan untuk sektor industri dan perumahan membuat lahan pertanian semakin terbatas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan bahan pangan harus terpenuhi. Pemberdayaan potensi ekonomi hijau yang dilaksanakan pemerintah di wilayah pesisir harus terencana agar langkah yang diambil sesuai dengan pentahapan, melibatkan *stakeholder* yang tepat agar dapat menarik minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberdayaan menggunakan siklus PDCA (*Plan Do Check Act*/Perencanaan, Tindakan, Cek, Tindaklanjuti) merupakan langkah manajemen dalam pemecahan masalah dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan melaksanakan siklus PDCA akan mampu mewujudkan sistem yang berkualitas, efektif dan efisien. Kegiatan pemberdayaan dapat terlaksana dan koordinasi antar bagian dapat berjalan dengan baik jika dipimpin dengan pemimpin yang dapat merangkul setiap komponen yang terlibat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sinergi seluruh

stakeholder memegang peranan dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan tersebut.

1) Fase Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan yang baik akan memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Pada tahap perencanaan pemerintah harus mengundang instansi yang ada di daerahnya untuk melaksanakan sinkronisasi jika instansi tersebut mempunyai program serupa agar program tersebut dapat sejalan dengan pemberdayaan yang dilaksanakan. TNI selama ini telah melaksanakan pembinaan teritorial yang dikenal dalam beberapa nama seperti serbuan teritorial oleh TNI AD maupun Kampung Bahari Nusantara oleh TNI AL demikian juga dengan Polri dalam melaksanakan pembinaan masyarakat. Sinkronisasi program tersebut agar tidak ada tumpang tindih kegiatan pemberdayaan pada satu lokasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar sasaran pemberdayaan dapat menyentuh sasaran yang lebih luas. Personel TNI yang turun langsung ke masyarakat seperti Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga atau Babinkamtibmas dapat diberi pelatihan pengetahuan pertanian agar dapat berperan aktif dalam melaksanakan bimbingan kepada masyarakat.

Keterlibatan Lembaga pendidikan diperlukan dalam perencanaan sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan yang mengamanatkan dalam penganekaragaman berbasis pangan lokal pemerintah daerah harus melibatkan perguruan tinggi. Pendekatan ilmu pengetahuan dalam melihat potensi yang ada, apakah dapat dikembangkan dengan pertanian lahan pasir atau pertanian lumpur serta bibit tanaman yang cocok dikembangkan menyesuaikan karakteristik tanah. Pengembangan lahan pertanian dapat menjadi tempat penelitian mahasiswa pertanian sehingga kegiatan pertanian menjadi berkembang secara dinamis. Lembaga pendidikan yang sudah terlibat dalam meneliti potensi pertanian wilayah pesisir adalah Universitas Gajah Mada dan sudah berhasil dalam

mengembangkan pertanian di wilayah pesisir selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pertanian cabai di lahan tersebut dapat mencapai 20 sampai 25 ton per hektar. Universitas Jenderal Soedirman telah berhasil mengembangkan padi varietas Inpari Unsoed 79 yaitu padi yang tahan air asin. Hal ini dapat menjadi solusi bagi lahan pertanian di daerah pesisir yang mempunyai salinitas yang tinggi akibat pengaruh air laut.

Pada sektor pembiayaan, pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir tentu membutuhkan biaya yang besar. Peran serta perusahaan swasta dapat digali sejak tahap perencanaan agar turut serta dalam pembinaan dengan alokasi CSR serta pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian. Pembinaan yang baik oleh pemerintah kepada sektor swasta menentukan tingkat partisipasi pihak swasta. Hal ini sejalan dengan pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang berbadan hukum wajib melaksanakan CSR. Latar belakang pelaksanaan CSR karena perusahaan melaksanakan kegiatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka harus turut bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan masyarakat setempat. CSR merupakan alat untuk mereduksi konflik dengan masyarakat akibat beroperasinya perusahaan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki perusahaan tersebut⁵⁸. CSR dapat dipakai sebagai perekat antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian akan tercipta simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang benar maka CSR dapat dianggarkan sebagai biaya tetap dan bukan merupakan beban bagi perusahaan dan hal ini sudah ditentukan dalam undang-undang. Penyediaan alat-alat pertanian dan pembangunan sarana prasarana dapat diperkuat oleh partisipasi pihak swasta sehingga masalah anggaran dapat terbantu.

⁵⁸ Rio Christiawan. 2021. *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*. 66. Bandung. Refika Aditama.

Terkait dengan lahan pertanian, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah dapat memberikan ijin menggunakan tanah kosong untuk lahan pertanian. Pemerintah dapat mencabut Hak Guna Tanah pada tanah-tanah kosong yang tidak dimanfaatkan pada wilayah pesisir guna diterbitkan Hak Guna Usaha pertanian bagi masyarakat. Pemberian ijin tersebut dapat membuat tanah-tanah kosong menjadi produktif digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi jelas pemanfaatannya, dapat memberikan pemasukan kepada pendapatan asli daerah. Penggunaan tanah-tanah tersebut menjadi terkontrol tetap pada sektor pertanian karena kegiatan pemberdayaan masyarakat terus berjalan dan dipantau perkembangannya. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberi izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir. Pada pasal 63 ayat 1 menyiratkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Pada fase Perencanaan harus dipastikan bahwa sudah ditemukan : a) permasalahan utama yang harus diselesaikan; b) sumber daya yang tersedia di daerah tersebut; c) sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan; d) solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah; serta e) parameter yang dipakai untuk mengukur keberhasilan.

2) Fase Tindakan (*Do*)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir sudah sesuai dengan teori pemberdayaan, seperti teori yang dikemukakan oleh Mubarak (2010) bahwa "*pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memulihkan atau*

meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas agar dapat mampu untuk berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka di dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat". Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Pada fase Tindakan (*Do*) seluruh kegiatan yang telah direncanakan diterapkan di lapangan pada skala kecil untuk melihat hasil dari perencanaan. Pada fase ini mungkin akan muncul masalah yang tidak diperkirakan, oleh karena itu pentingnya melaksanakan pada skala kecil agar dapat mencari solusi pada skala kecil. Keterlibatan seluruh *stakeholder* dibutuhkan agar mengerti permasalahan dan sepakat dalam mencari solusi. Hal ini mengaktifkan lagi kearifan lokal untuk saling bergotong royong dalam bidang pertanian. Pembentukan kelompok tani merupakan wadah untuk memperkuat kerjasama baik antar petani, antar kelompok petani maupun dengan pihak yang melaksanakan pemberdayaan. Pendampingan oleh lembaga pendidikan akan lebih mudah melalui kelompok tani karena ilmu yang diberikan dapat diteruskan kepada petani dalam kelompok taninya.

Keberhasilan Provinsi Yogyakarta dalam pengembangan lahan pertanian pasir di Pantai selatan Yogyakarta dapat dijadikan contoh dan diterapkan, keberhasilan pertanian di pantai selatan Cilacap dengan pengembangan varietas padi tahan air asin dapat menjawab ancaman cuaca dan pengaruh air laut terhadap pengembangan pertanian di wilayah pesisir. Pelaksanaan tindakan dalam skala kecil dapat menjadi sarana pelatihan yang efektif bagi petani dengan bimbingan lembaga pendidikan yang bersinergi dengan Pemerintah daerah dan Instansi vertikal dalam hal ini TNI (TNI AD, TNI AL maupun TNI AU) dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di daerah tersebut.

3) Fase Cek (*Check*).

Fase Cek merupakan fase yang paling penting dalam siklus PDCA karena pada fase ini dilakukan perbaikan terhadap permasalahan dan kesalahan yang ditemukan pada fase *Do*, dilaksanakan perbaikan agar kesalahan tidak terulang kembali dan pemberdayaan dapat berjalan dengan sukses. Pada fase ini dilaksanakan audit apakah eksekusi pada fase *Do* sudah dilaksanakan sesuai perencanaan. Proses fase *Chek* dan *Do* dapat dilakukan berulang kali untuk menghasilkan hasil yang sesempurna mungkin.

Pada fase *Chek* dibutuhkan figur Kepemimpinan Kepala Daerah dalam yang dapat merangkul semua pihak, baik instansi vertikal, CSR, lembaga pendidikan maupun masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan proses yang dapat dilakukan berulang dalam mencari bentuk pemberdayaan yang terbaik. Komunikasi yang baik harus dapat dijalin sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau tidak dihargai. Komunikasi petugas di lapangan sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan pemimpin daerah harus jelas agar keinginan dan perbaikan dapat terlaksana. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau turun ke bawah untuk melihat keberhasilan dan permasalahan di lapangan. Perhatian seorang pemimpin akan meningkatkan moril masyarakat yang dipimpinnya.

4) Fase Tindak lanjut (*Act*)

Fase *Act* merupakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam skala besar. Pada fase *Act* kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil fase *Do* dan *Check* yang dilaksanakan berulang-ulang sehingga segala kendala yang ditemui pada fase *Do* telah mendapat evaluasi dan solusi pada fase *Check* yang membuat pelaksanaan pada fase *Act* menjadi efektif dan efisien. Fase *Act* merupakan fase terakhir dalam siklus PDCA, akan tetapi siklus PDCA akan terus berkelanjutan. Dengan demikian setiap melewati satu siklus PDCA akan didapat standar baru untuk meningkatkan

produktivitas dan efisiensi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dalam bidang pertanian.

c. Menjamin kepastian pemasaran hasil dari masyarakat pesisir.

Permasalahan yang sering terabaikan dalam sektor pertanian adalah kontrol distribusi dan harga hasil panen. Sering dijumpai petani yang membuang hasil panen karena turunnya harga jual dan kebutuhan pasar tidak sebesar hasil panen. Jika kejadian seperti itu terus berulang maka daya tarik sektor pertanian kurang menjanjikan. Perhatian terhadap kepastian pemasaran hasil dari pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir perlu dipikirkan agar memberikan rasa aman bagi para petani. Sinergi dari *stakeholder* di daerah dapat menjamin kepastian pemasaran hasil dari masyarakat.

1) Penetapan kantong-kantong lumbung pangan.

Kantong-kantong lumbung pangan penting bagi ketersediaan pangan dan jalur distribusi pangan. Kementerian Pertahanan melalui Permenhan nomor 1 tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Nasional, salah satu penekanannya adalah pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi. Hal ini untuk menjawab ancaman potensial yaitu kelangkaan pangan. Salah satu sasaran strategis Pertahanan negara adalah terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi. Hal tersebut dijabarkan dengan mewujudkan pembentukan satuan produksi pangan pada satuan TNI dengan penambahan satuan produksi pangan di tingkat Korem, Kodim, Brigade dan Batalion (TNI AD). Penambahan satuan produksi pangan di tingkat Lantamal dan Lanal (TNI AL) dan penambahan satuan produksi pangan di tingkat Lanud (TNI AU). Dalam penutup Permenhan tersebut ditekankan untuk melaksanakan sinergitas dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyiapan logistik.

Pembentukan Badan Pangan Nasional berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2021, bertanggung jawab terhadap kebijakan pangan nasional bertanggung jawab terhadap permasalahan di hilir

sektor pertanian. Terbentuknya Badan Pangan Nasional diharapkan memberikan angin segar dalam penanganan isu pangan. Koordinasi melekat dengan Badan pangan Nasional terkait lumbung pangan, bahan makanan yang harus diamankan serta distribusi ke daerah yang membutuhkan membuat pemerataan pangan nasional. Badan Pangan Nasional dapat memangkas ego sektoral pada Kementerian Pertanian terkait cadangan pangan, Kementerian Perdagangan terkait kebijakan impor beras dan Kementerian BUMN dalam mengelola Bulog karena kewenangannya telah diambil alih oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan pasal 3 Perpres nomor 66 tahun 2021.

2) Pengendalian rantai distribusi.

Distribusi pangan menjamin pemerataan ketersediaan pangan. Distribusi yang baik akan menjaga mutu dan gizi serta efektivitas penanganan hasil panen. Keberhasilan distribusi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Distribusi yang baik tidak terlepas dari transportasi baik dari lahan pertanian, menuju gudang atau langsung kepada pasar. Jika distribusi jelek maka kualitas hasil panen akan menurun karena terjadi penumpukan yang lama berimbas terhadap penurunan kualitas pangan, bahkan yang terburuk adalah hasil panen menjadi busuk sebelum sampai ke tangan konsumen.

Kehadiran pemerintah dalam penanganan rantai distribusi menjadi penting, karena daerah pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir sudah dipetakan dan jenis tanaman pertanian sudah diketahui. Pembangunan gudang dan pengembangan usaha olahan hasil pertanian menjadi penting agar hasil pertanian dapat terserap dan harga tetap dapat terjaga. Kerjasama dengan dunia usaha (pihak swasta) yang melaksanakan CSR atau pengembangan UMKM dapat menjadi jalan keluar untuk mengolah hasil pertanian di luar kebutuhan bahan segar oleh konsumen. Pemasaran dalam bentuk hasil olahan menaikkan harga jual hasil pertanian. Dengan

pengolahan hasil pertanian dalam bentuk olahan seperti industri saus tomat atau sambal botol, keripik daun bayam, aneka keripik kacang dan lain sebagainya dapat menjadi alternatif UMKM yang berdampingan dengan sektor pertanian.

Sistem distribusi yang baik dapat menekan peran tengkulak yang bermain memanfaatkan kelemahan petani yang sering terbelit hutang kepada tengkulak dengan sistem ijon. Sudah banyak kejadian permainan tengkulak yang membuat petani terjatuh hutang dan tidak bisa lepas dari ketergantungan permainan harga oleh tengkulak. Kondisi tersebut membuat harga hasil panen sangat murah dari tangan petani ke tengkulak, keuntungan dari pertanian hanya dinikmati oleh tengkulak. Praktik ini tentu merugikan petani. Kehadiran pemerintah yang bersinergi dengan TNI dan Polri dalam mengawasi rantai distribusi sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat menekan kehadiran tengkulak dan memberi rasa aman bagi petani, kepastian harga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Pemanfaatan teknologi digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini teknologi digital sudah dimanfaatkan pada sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi digital pada sektor pertanian berupa informasi pengembangan budidaya pertanian, sarana komunikasi antara sesama petani atau antara petani dengan pemerintah dan *stakeholder* pembina petani, juga untuk pemasaran hasil pertanian. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian dapat memotong rantai distribusi dan membuat petani menjadi inovatif dalam memasarkan hasil pertaniannya.

Pengenalan pemanfaatan teknologi digital dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir juga dapat memanfaatkan program Kementerian Komunikasi dan informasi untuk menyediakan fasilitas internet di seluruh desa dan kelurahan

pada akhir tahun 2022⁵⁹. Hal ini sejalan dan sinergi dengan program dari instansi vertikal di daerah. Penggunaan teknologi digital telah lama dilaksanakan pada pertanian di negara lain seperti pertanian di Jepang dan China yang telah maju dalam memanfaatkan teknologi digital di sektor pertanian dan sudah memberikan hasil yang positif dalam peningkatan hasil pertanian. Penggunaan teknologi digital tersebut berhasil memberikan dampak positif bagi peningkatan hasil pertanian. Para petani dapat melihat keberhasilan pertanian di negara tersebut untuk dijadikan contoh dan diterapkan pada lahan pertaniannya melalui media internet. Kehadiran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan teknologi digital yang diterapkan dalam sektor pertanian masih dibutuhkan mengingat hal tersebut membutuhkan biaya yang besar.

d. Analisa SWOT.

Untuk mengambil kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir guna mewujudkan ekonomi hijau maka data yang tersaji pada Bab II dan uraian pada Bab III penulis analisa menggunakan metode SWOT. Hal ini dilakukan untuk menemukan aspek-aspek penting dengan menggali faktor kekuatan, kelemahan sebagai faktor internal dan mendata semua peluang dan ancaman pada faktor eksternal. Dengan mengetahui aspek-aspek penting diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan yang ada, meminimalkan dan membenahi kelemahan. Berinovasi dalam menghadapi ancaman dan membangun kesempatan untuk memanfaatkan peluang demi menuju kondisi yang lebih baik di masa depan. Analisa SWOT memberi gambaran situasi yang dihadapi dan mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. RD Jatmiko mengatakan tujuan penggunaan analisa SWOT “*agar organisasi atau perusahaan dapat mampu untuk memanfaatkan segala*

⁵⁹ <https://www.solopos.com/menkominfo-akhir-2022-internet-tersedia-di-83-548-desa-kelurahan-1209080>, diunduh tanggal 3 Agustus pukul 21.34 WIB

*informasi perubahan untuk mendapat keunggulan yang kompetitif di masa depan*⁶⁰.

Berdasarkan kondisi yang telah tertuang di atas maka penulis menggolongkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol akan masuk dalam peluang dan ancaman serta faktor-faktor internal yaitu faktor yang dapat dikontrol menjadi kekuatan dan kelemahan.

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang ada di dalam pemerintahan seperti kondisi finansial, keunggulan organisasi, pengalaman organisasi maupun sumber daya yang dimiliki. Pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi di internal. Faktor internal dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir adalah:

Tabel 2.

Faktor-faktor IFAS

No.	Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot
	Kekuatan	
1.	Pembinaan masyarakat di wilayah pesisir di bidang pertanian dilaksanakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan Ekonomi hijau adalah salah satu program utama pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	3
2.	Perundang-Undangan yang dikeluarkan pemerintah termasuk yang mengatur otonomi daerah sudah mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mewujudkan ekonomi hijau	2
3.	Pemerintah daerah dan instansi vertikal (TNI/Polri, kementerian di daerah) mempunyai hubungan yang baik dan dapat dimanfaatkan secara bersama melaksanakan pembinaan masyarakat pesisir	3

⁶⁰ <https://frconsultantindonesia.com/id/apa-sih-manfaat-tujuan-dan-fungsi-dari-analisis-swot/#:~:text=Funsi%20juga%20tujuan%20dari%20SWOT,pejuang%2Dpejuang%20di%20masa%20depan.,> diunduh tanggal 28 Juli 2022 pukul 20.34 WIB

4.	Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	2
	Total nilai Kekuatan	10
	Kelemahan	
1.	Sinergitas program pemberdayaan masyarakat antara Pemda dan instansi vertikal saat ini masih lemah	3
2.	Pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang pertanian membutuhkan biaya yang besar	2
3.	Pemerintah kurang mempunyai tenaga terampil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir	3
4.	Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir rawan perubahan kebijakan dari pemerintah	4
	Total nilai Kelemahan	10

Setelah mendapat faktor internal, maka faktor eksternal sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan karena berasal dari luar pemerintahan yang harus dapat dimanfaatkan pada kategori peluang dan harus mencari solusi dalam menghadapi ancaman. Faktor eksternal pada pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Faktor-faktor EFAS

No.	Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot
	Peluang	
1.	TNI/Polri mempunyai program pembinaan teritorial yang dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah pesisir	3
2.	Keterlibatan Lembaga Pendidikan/Universitas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah pesisir sangat dibutuhkan guna memecahkan masalah, mencari solusi dari sisi ilmu pengetahuan dan mendapat temuan varietas unggul padi tahan air asin dan pengembangan hortikultura	2

3.	CSR dari Perusahaan Swasta dapat dimanfaatkan untuk memperkuat biaya dan pengolahan hasil pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir	2
4.	Wilayah Pesisir Indonesia adalah potensi yang besar untuk dapat dikembangkan pada sektor pertanian	1
5.	Pertumbuhan penduduk Indonesia menyediakan tenaga kerja yang besar dapat menjadi modal potensial dalam Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir	1
6.	Keterlibatan TNI/Polri dalam melaksanakan kontrol harga pasar dan rantai distribusi dapat menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani	1
	Total Nilai Peluang	10
	Ancaman	
1.	Perubahan iklim dunia yang berakibat perubahan suhu dan kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman bagi pemberdayaan masyarakat pesisir	2
2.	Pemberdayaan masyarakat pesisir di sektor pertanian mendapat tantangan dari perkembangan sektor industri yang menarik generasi muda beralih ke sektor industri	1,5
3.	Kemiskinan adalah masalah utama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir	1,5
4.	Tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab rendahnya Sumber Daya Manusia di wilayah pesisir	2
5.	Permainan tengkulak dalam mengendalikan harga dapat merugikan petani dan menghambat pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir	3
	Total Nilai Ancaman	10

Dari faktor-faktor yang ditemukan maka penulis membuat kuesioner untuk mengetahui strategi apa yang akan dipergunakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir (Format Kuesioner terlampir). Kuesioner dilakukan secara *online* dan telah diisi oleh 64 responden. Data yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Tabel hasil Kuesioner Rating IFAS

IFAS	KEKUATAN	JUMLAH	RATA-RATA	PEMBULATAN
	Indikator 1	239	3,73	4
	Indikator 2	193	3,02	3
	Indikator 3	234	3,66	4
	Indikator 4	242	3,78	4
	KELEMAHAN			
	Indikator 1	195	3,01	3
	Indikator 2	176	2,75	3
	Indikator 3	182	2,84	3
	Indikator 4	193	3,01	3

Tabel 5.

Tabel hasil Kuesioner Rating EFAS

EFAS	PELUANG	JUMLAH	RATA-RATA	PEMBULATAN
	Indikator 1	241	3,77	4
	Indikator 2	241	3,77	4
	Indikator 3	234	3,66	4
	Indikator 4	230	3,59	4
	Indikator 5	240	3,75	4
	Indikator 6	206	3,22	3
	ANCAMAN			
	Indikator 1	220	3,44	3
	Indikator 2	202	3,16	3
	Indikator 3	215	3,36	3
	Indikator 4	227	3,55	4
	Indikator 5	241	3,77	4

Tabel. 6.
Tabel hasil akhir IFAS

No.	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
	KEKUATAN (STRENGHT)				
1.	Gerakan Ekonomi Hijau	3	4	12	Promosi
2.	Peraturan Perundangan	2	3	6	Perkuat
3.	Hubungan Pemerintah dan instansi vertikal	3	4	12	Kerjasama
4.	Peningkatan PAD	2	4	8	Sosialisasi
	Total Kekuatan			38	
	KELEMAHAN (WEAKNESS)				
1.	Sinergi Pemerintah dan Instansi Vertikal	3	3	9	Konsolidasi
2.	Pemberdayaan membutuhkan biaya tinggi	2	3	6	CSR
3.	Kurangnya tenaga terampil	3	3	9	Pelatihan
4.	Kerawanan Perubahan kebijakan	2	3	6	Undang-undang
	Total Kelemahan			30	
	Kekuatan – Kelemahan			8	

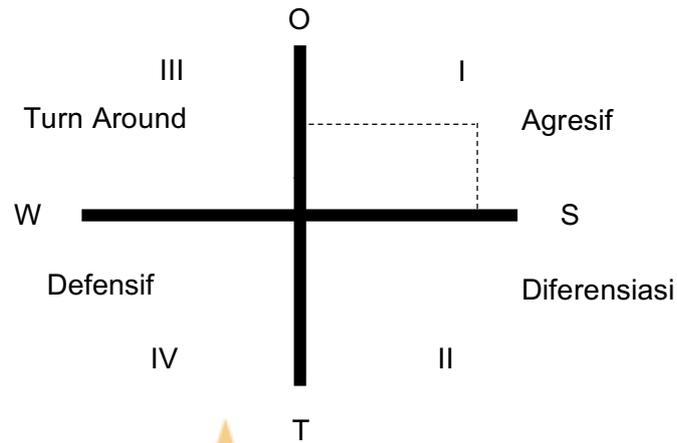
Tabel. 7.
Tabel hasil akhir EFAS

No.	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
	PELUANG (OPPORTUNITY)				
1.	Pemanfaatan program teritorial TNI/Polri	3	4	12	Kerjasama

2.	Keterlibatan Lembaga Pendidikan	2	4	8	Kerjasama
3.	Pemanfaatan CSR Swasta	2	4	8	Kerjasama
4.	Wilayah Pesisir adalah potensi besar untuk pertanian	1	4	4	Eksplorasi
5.	Pertumbuhan penduduk menjadi modal penyerapan tenaga kerja	1	4	4	Pelatihan/ Promosi
6.	Keterlibatan TNI/Polri untuk kontrol harga dan rantai distribusi hasil panen	1	3	3	Kerjasama
Total Peluang				39	
ANCAMAN (THREATH)					
1.	Perubahan iklim	2	3	6	Inovasi
2.	Ancaman pertumbuhan sektor industri	1,5	3	4,5	Promosi
3.	Kemiskinan	1,5	3	4,5	Pemberdayaan
4.	SDM rendah	2	4	8	Pelatihan
5.	Permainan tengkulak	3	4	12	Penertiban
Total Ancaman				35	
Peluang – Ancaman				4	

Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan, maka hasil perhitungan faktor internal dan eksternal digambarkan dalam matriks *grand strategy*. Hasil perhitungan menunjukkan nilai faktor internal (kekuatan – kelemahan) adalah 8 dan faktor eksternal (peluang –

ancaman) adalah 4, sehingga penggambaran pada matriks *grand strategy* adalah sebagai berikut :



Dari *matriks grand strategy* terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir berada pada kuadran I yang berarti kekuatan dan peluang terbuka lebar. Pemerintah harus memanfaatkan dengan melaksanakan sosialisasi aktif dengan memanfaatkan *stakeholder* seperti TNI/Polri, CSR dari perusahaan swasta, lembaga pendidikan dalam menjadikan lahan yang tersedia di wilayah pesisir untuk dikembangkan pada sektor pertanian.



BAB - IV PENUTUP

17. Simpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada Bab III menggunakan data dan fakta serta dengan landasan teori yang telah dijabarkan pada Bab II maka diperoleh kesimpulan untuk menjawab pertanyaan kajian pada Bab I sebagai berikut:

- a. Masyarakat di wilayah pesisir adalah masyarakat yang keras, tegas dan terbuka dapat menyesuaikan setiap perubahan alam. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan bergelut dengan laut dengan penghasilan yang tidak dapat dikontrol dan hidup berpindah mengikuti musim. Kondisi yang demikian membuat banyak nelayan yang merangkap sebagai petani karena ditunjang dengan kondisi alam yang memungkinkan membuka lahan pertanian di wilayah pesisir pantai. Pada musim-musim tertentu nelayan ke laut dan pada musim lainnya mereka bertani sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekologi yang mereka hadapi. Permasalahan yang paling menonjol di wilayah pesisir adalah kemiskinan dengan 4,19% lebih tinggi dari rata-rata nasional dan dari jumlah masyarakat miskin ekstrem nasional sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 % ada pada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir (1,3 juta jiwa). Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir rendah di bawah angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah nasional. Hasil survei yang dilaksanakan oleh mitra Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 menyatakan yang membuat rendahnya tingkat pendidikan di wilayah pesisir adalah rendahnya motivasi untuk sekolah, belum tercukupi tenaga pengajar, jam sekolah tidak cocok dengan waktu melaut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan motivasi yang membuat rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir. Ciri masyarakat pesisir yang dapat menyesuaikan dengan setiap perubahan lingkungan, pekerja keras serta terbuka merupakan modal penting dalam

pemberdayaan masyarakat ke arah pertanian untuk memberikan kepastian hasil dan memberi jaminan perekonomian yang lebih baik.

- b. Ekonomi hijau adalah pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat namun juga ramah terhadap lingkungan serta inklusif secara sosial. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut dimana wilayah lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, wilayah daratnya masih dipengaruhi oleh aktivitas laut seperti pasang surut, perembesan air asin dan angin laut membuat wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan saling berinteraksi. Panjang pantai Indonesia 108.000 Km dengan kekayaan sumber daya alam di dalamnya sangat strategis bagi pengembangan pertanian pesisir. Sebanyak 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir radius 50 km dari garis pantai. Terdapat 514 Kabupaten/kota terdapat di wilayah pesisir merupakan garda terdepan bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Pertanian di wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang berbeda dari pertanian di wilayah pegunungan atau daratan yang jauh dari laut. Lahan di wilayah pesisir pada umumnya adalah lahan lumpur dan lahan pasir, butuh penanganan yang berbeda dan jenis tanaman yang dapat ditanam juga berbeda. Universitas Jenderal Soedirman telah berhasil mengembangkan padi varietas Inpari Unsoed 79 yang tahan air asin. Pengembangan oleh Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman di pesisir selatan Cilacap yang merupakan salah satu lumbung padi nasional. Universitas Gajahmada telah berhasil mengembangkan pertanian di lahan berpasir di Selatan Yogyakarta menjadi lahan pertanian yang subur dan produktif dengan mengembangkan tanaman seperti cabai, melon, terong, kacang panjang, semangka dan komoditas sayur mayur dengan distribusi hasil

panen sampai di luar pulau Jawa yaitu Medan, Batam, Palembang, Jambi dan Lampung menunjukkan besarnya potensi pasar terhadap hasil pertanian tersebut. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh dan diterapkan di wilayah pesisir Indonesia lainnya.

- c. Peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan dan melaksanakan pendampingan sehingga kemajuan yang diharapkan selalu dapat terpantau. Pemberdayaan potensi ekonomi hijau yang dilaksanakan pemerintah di wilayah pesisir harus terencana memperhatikan perencanaan, penataan pelaksanaan, kepemimpinan dan pengendalian. Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir melibatkan instansi vertikal, pelaku usaha memanfaatkan CSR, lembaga pendidikan, pengendalian penggunaan lahan, dengan pemimpin yang dapat merangkut seluruh *stakeholder*. Upaya menjamin kepastian pemasaran hasil dari masyarakat pesisir dilakukan dengan penetapan lumbung-lumbung pangan, pengendalian rantai distribusi, dan pemanfaatan teknologi digital. Penetapan lumbung pangan dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dan jalur distribusi pangan, bekerjasama dengan TNI dalam mewujudkan depo logistik dan Badan Pangan Nasional terkait distribusi di hilir. Pengendalian rantai distribusi dilakukan untuk menjamin pemerataan ketersediaan pangan. Keberhasilan distribusi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Distribusi yang baik tidak terlepas dari transportasi baik dari lahan pertanian, menuju gudang atau langsung kepada pasar. Pemasaran dalam bentuk hasil olahan turut menaikkan harga jual hasil pertanian. Kerjasama dengan dunia usaha (pihak swasta) yang melaksanakan CSR atau pengembangan UMKM dapat menjadi jalan keluar untuk mengolah hasil pertanian di luar kebutuhan bahan segar oleh konsumen. Sistem distribusi yang baik dapat menekan peran tengkulak yang bermain memanfaatkan kelemahan posisi petani yang selama ini sering terbelit hutang kepada tengkulak. Kehadiran pemerintah yang bersinergi dengan TNI dan Polri dalam mengawasi

rantai distribusi sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dapat menekan kehadiran tengkulak dan memberi rasa aman bagi petani. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian dapat memotong rantai distribusi dan membuat petani menjadi inovatif dalam melaksanakan pemasaran. Pemenuhan ketersediaan fasilitas digital dapat dilakukan dengan memanfaatkan program Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyediakan fasilitas internet di seluruh desa dan kelurahan pada akhir tahun 2022.

18. Rekomendasi.

- a. Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat mengeluarkan **“Peraturan Pemerintah tentang Pertanian Pesisir”** untuk menggerakkan Kementerian, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat secara terpadu mengembangkan potensi wilayah pesisir menjadi lahan pertanian yang produktif menunjang ketahanan pangan Nasional dan target Indonesia sebagai Lumbung pangan dunia tahun 2045. Peraturan tersebut juga memasukkan penggunaan dana CSR Perseroan Terbatas di Kota yang telah berkembang maju agar dapat dipergunakan untuk pengembangan pertanian pesisir di luar daerah Perseroan Terbatas tersebut berada sebagai dasar penggunaan dana CSR pada daerah pesisir yang membutuhkan.
- b. Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pemberdayaan pertanian di wilayah pesisir melakukan :
 - 1) Menerbitkan **“Peraturan Menteri Pertanian tentang pertanian di wilayah pesisir”** sebagai panduan dalam melaksanakan pembinaan pertanian di wilayah pesisir.
 - 2) Mengeluarkan **“Peta jenis tanaman unggulan yang dapat dikembangkan dengan pertanian pesisir”** sesuai dengan kemampuan dan karakteristik setiap daerah. Peta ini membuat pemerintah daerah dan instansi yang melaksanakan pemberdayaan dapat fokus dalam melaksanakan jenis pertanian yang dikembangkan demi menjaga ketahanan pangan nasional dan keanekaragaman pangan berbasis pangan lokal.

- 3) Memanfaatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan China, Jepang dan Thailand untuk pengembangan bibit padi tahan air asin, pemanfaatan teknologi digital bagi pertanian dan pengelolaan pertanian di lahan wilayah pesisir.
 - 4) Melaksanakan pelatihan penyuluh pertanian terpadu dengan personel teritorial TNI sebagai garda terdepan pembina pertanian masyarakat wilayah pesisir.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemkominfo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan pemasangan fasilitas internet di daerah pembinaan dan pada satuan/instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan untuk mempermudah komunikasi dan pemanfaatan teknologi digital pertanian wilayah pesisir.
- d. Pemerintah Daerah.
- 1) Melaksanakan kerjasama dengan instansi vertikal seperti TNI/Polri yang mempunyai pembinaan teritorial untuk bersama-sama menetapkan daerah sasaran dan target yang akan dicapai. Sasaran daerah pembinaan berada di sekitar wilayah kerja agar memudahkan dalam pengawasan.
 - 2) Melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi di daerahnya, melakukan konsultasi dengan Universitas Gajah Mada dan Universitas Jenderal Soedirman dalam mengembangkan lahan lumpur dan lahan berpasir menjadi lahan pertanian wilayah pesisir yang produktif agar keberhasilan dalam melaksanakan pertanian di Cilacap dan Yogyakarta dapat diterapkan di daerah lain.
 - 3) Melengkapi daerah pembinaan dengan fasilitas digital yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi daerah.
 - 4) Memanfaatkan dana CSR dari perusahaan swasta untuk memperkuat anggaran dan infrastruktur pembinaan masyarakat di wilayah pesisir.
 - 5) Melaksanakan penertiban lahan di wilayah pesisir yang tidak dimanfaatkan (lahan tidur) dengan mencabut hak guna usaha untuk dialih fungsikan menjadi lahan pertanian sehingga menjadi lahan

produktif dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah.

e. Mabes TNI. Mabes TNI melalui Staf Teritorial Panglima TNI melaksanakan :

- 1) Rapat Koordinasi teritorial TNI (Rakorter TNI) pada Triwulan I setiap tahun anggaran memberi kesempatan kepada Kementerian Pertanian untuk memaparkan ketahanan pangan dan potensi pengembangan wilayah pesisir di sektor pertanian untuk dapat dikembangkan oleh Satuan-satuan TNI di daerah.
- 2) Pembagian sasaran pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pada saat Rakorter yang dihadiri oleh Staf Teritorial dari ketiga Angkatan. Staf Teritorial Mabes TNI membagi sektor wilayah pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh jajaran Kewilayahan dan Satuan Operasi agar wilayah sasaran maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.
- 3) Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pada tingkat satuan kewilayahan/Satuan Operasi menjadi sasaran pembinaan teritorial dari ketiga angkatan yaitu serbuan teritorial di TNI Angkatan Darat, Pembinaan potensi Maritim pada TNI Angkatan Laut dan pembinaan potensi Dirgantara pada TNI Angkatan Udara.
- 4) Pembuatan lahan percontohan oleh Satuan kewilayahan dan Satuan Operasi yang dapat dipergunakan sebagai tempat pelatihan bagi masyarakat pesisir dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Satria. 2015. "Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir". 8. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor.
- BPS. 2021. Profil kemiskinan Kabupaten Tuban 2021.16. BPS Kabupaten Tuban.
- BPS. 2022. Beberapa indikator makro social ekonomi Provinsi Jawa Tengah edisi April 2022.10. BPS Jawa Tengah.
- BPS. 2021. Data dan informasi kemiskinan Sulawesi Selatan 2021.14. BPS Sulawesi Selatan.
- Freddy Rangkuti. 2013. "Analisis SWOT, cara perhitungan bobot, rating dan OCAI". 3. Jakarta. PT Gramedia.
- KPH Tejiyuwono. 2021. Pengembangan lahan basah rawa dan gambut. 108-109. Yogyakarta. Lily Publisher.
- M. Aris Syarifudin, dkk. 2019. Pendidikan bagi anak nelayan. 9. Jakarta. Ditjen Dikdasmen Kemendikbudristek.
- Rio Christiawan. 2021. Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia. 66. Bandung. Refika Aditama.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. 2010. "Manajemen". 9. Jakarta. Erlangga
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Internet

Dr. Yonvitner dkk. Pengelolaan wilayah pesisir.7. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf>, diunduh tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.07 WIB

Mengenal lebih dalam langkah aplikasi ekonomi hijau di Indonesia. Pada <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-Indonesia>, diunduh tanggal 10 Mei 2022 pukul 10.52 Wib

Ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>, diunduh tanggal 7 April 2022 pukul 19.40 Wib

Presiden Jokowi paparkan strategi Indonesia wujudkan ekonomi hijau. Pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/hadiri-wef-presiden-jokowi-paparkan-strategi-indonesia-wujudkan-ekonomi-hijau/>, diunduh tanggal 10 April 2022 pukul 18.31 Wib

Masyarakat pesisir hadapi empat masalah. Pada <https://bisnis.tempo.co/read/447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diunduh tanggal 16 Mei pukul 06.50 Wib

Pemberdayaan masyarakat, pengertian, prinsip dan tujuannya. Pada <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5WY9TA/full>, diunduh tanggal 16 Mei 2022 pukul 06.52 Wib

Pemerintah targetkan hapus kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir. Pada <https://kominfo.go.id/content/detail/38902/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-wilayah-pesisir/0/berita>, diunduh tanggal 16 Mei 2022 pukul 11.32 Wib

Mengenal lebih dalam konsep aplikasi ekonomi hijau di Indonesia. Pada <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>, diunduh tanggal 5 Juli 2022 pukul 19.21 WIB

Hortikultura. Pada <https://kbbi.web.id/hortikultura>, diunduh tanggal 6 Juli 2022 pukul 17.42 WIB

Salinitas. Pada <https://kbbi.web.id/salinitas>, diunduh tanggal 6 September 2022 pukul 22.45 WIB

- Kelompok Tani: Fungsi dan peran kelompok tani. Pada <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85489/KELOMPOK-TANI--FUNGSI-DAN-PERAN-KELOMPOK-TANI/>, diunduh tanggal 27 Juli 2022 pukul 19.45 WIB
- Pemberdayaan masyarakat, pengertian, prinsip dan tujuan. Pada <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuan-nya-1vH6b5Wy9TA/2>, diunduh tanggal 16 Juni 2022 pukul 17.25 WIB
- Masyarakat. Pada <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diunduh tanggal 4 Juli 2022 pukul 19.05 WIB
- Green Growth. Pada <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>, diunduh tanggal 3 Juli 2022 pukul 21.09 WIB
- Dipimpin Arief Prasetyo Adi, apa itu badan pangan nasional. Pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20220221/15/1502878/dipimpin-arief-prasetyo-adi-apa-itu-badan-pangan-nasional>, diunduh tanggal 21 Mei 2022 pukul 21.05 WIB
- Konsep dan teori pemberdayaan masyarakat. Pada <https://prASFapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>, diunduh tanggal 9 April pukul 20.30 Wib.
- Dispertan sosialisasikan pengembangan padi salin. Pada <http://dispertan.cilacapkab.go.id/2020/07/30/dispertan-sosialisasikan-pengembangan-padi-salin/>, diunduh tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.21 WIB
- Kabupaten Cilacap raih penghargaan Abdi Bhakti Tani 2021. Pada <https://cilacapkab.go.id/v3/kabupaten-cilacap-raih-penghargaan-abdi-bakti-tani-2021/>, diunduh tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.50 WIB
- Mengubah nasib lewat bertani di lahan pesisir. Pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengubah-nasib-lewat-bertani-di-lahan-pasir-pesisir.html>, diunduh tanggal 28 Agustus 2022 pukul 21.34 WIB
- Perubahan iklim dan pertanian : Perubahan iklim akan menyebabkan kekeringan yang merusak 426.000 hektare sawah. Pada https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_iklim_dan_pertanian#:~:text=Perubahan%20iklim%20akan%20menyebabkan%20kekeringan,yang%20merusak%20426.000%20hektare%20sawah., diunduh tanggal 17 Juni 2022 pukul 09.52 WIB
- Dari MDGs ke SDGs. Pada <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/dari-mdgs-ke-sdgs/>, diunduh tanggal 31 Agustus 2022 pukul 22.34 WIB
- Akibat Perang Rusia-Ukraina OECD proyeksi ekonomi global tahun ini hanya 3 persen. Pada <https://money.kompas.com/read/2022/06/10/073325126/akibat-perang-rusia-ukraina-oecd-proyeksi-ekonomi-global-tahun-ini-hanya-3> diunduh tanggal 14 Juni pukul 20.53 WIB

Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pada <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/dinamika-penduduk-benua-benua-di-dunia-8464/>, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.21 WIB

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2260>, diunduh tanggal 27 Agustus 2022 pukul 19.04 WIB

Ambisi China jadi lumbung pangan terbesar dunia. Pada <https://internasional.kontan.co.id/news/ambisi-china-jadi-lumbung-pangan-terbesar-dunia>, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.54 WIB

Cina luncurkan beras air laut skala besar untuk tingkatkan produksi. Pada <https://pertanian.sariagri.id/96649/cina-luncurkan-beras-air-laut-skala-besar-untuk-tingkatkan-produksi>, diunduh tanggal 23 Juli 2022 pukul 19.05 WIB

Jepang gencarkan digital farming untuk jaga ketahanan pangan. Pada <https://www.disrupto.co.id/journal/jepang-gencarkan-digital-farming-untuk-jaga-ketahanan-pangan>, diunduh tanggal 23 Juli 2022 pukul 21.02 WIB

Negara Gajah Putih dan The Kitchen of the World. Pada <http://faperta.unisma.ac.id/negara-gajah-putih-dan-the-kitchen-of-the-world/>, diunduh tanggal 31 Juli 2022 pukul 20.02 WIB

Jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diunduh tanggal 24 Juli 2022 pukul 21.32 WIB

Laju pertumbuhan penduduk. Pada <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, diunduh tanggal 25 Juli 2022 pukul 17.02 WIB

Produktivitas pangan dan penyusutan lahan pertanian di Indonesia. Pada <https://bisnisnews.id/detail/berita/produktifitas-pangan-dan-penyusutan-lahan-pertanian-di-Indonesia>, diunduh tanggal 3 April 2022 pukul 16.25 WIB

BPS sebut potensi luas lahan panen beras padi menyusut 0.14 juta hektare tahun ini. Pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211015/12/1454724/bps-sebut-potensi-luas-lahan-panen-padi-menyusut-014-juta-tahun-ini>, diunduh tanggal 12 April 2022 pukul 21.06 WIB

Jokowi resmi bentuk Badan Pangan Nasional, ini tugasnya. Pada <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-resmi-bentuk-badan-pangan-nasional-ini-tugasnya>, diunduh tanggal 3 Juli pukul 16.07 WIB

Tentara cetak sawah. Pada <https://www.forestdigest.com/detail/1570/tentara-cetak-sawah>, diunduh tanggal 3 Juli 2022 pukul 21.05 WIB

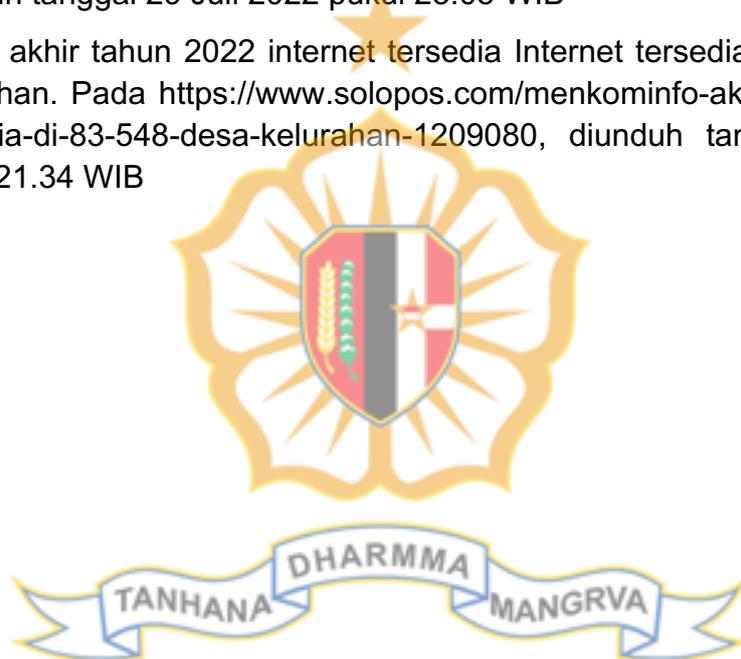
- Masyarakat pesisir hadapi empat masalah. Pada <https://bisnis.tempo.co/read/447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diunduh tanggal 18 Juli 2022 pukul 17.20 WIB
- Pimpin rapat kemiskinan ekstrem Wapres sebut wilayah pesisir angkanya lebih tinggi dan kompleks. Pada https://www.setneg.go.id/baca/index/pimpin_rapat_kemiskinan_ekstrem_wapres_sebut_wilayah_pesisir_angkanya_lebih_tinggi_dan_lebih_kompleks, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.08 WIB
- Jokowi targetkan RI bebas dari kemiskinan ekstrem tahun 2024. Pada <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61970dc552d5e/jokowi-targetkan-ri-bebas-dari-kemiskinan-ekstrem-tahun-2024>, diunduh tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.51 WIB
- Garis kemiskinan meningkat per Maret 2022. Pada <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-garis-kemiskinan-meningkat-per-maret-2022>, diunduh tanggal 31 Agustus pukul 20.10 WIB
- Harapan lama sekolah Indonesia naik jadi 13,08 Tahun pada 2021. BPS mencatat, menempuh pendidikan hingga Diploma I. Pada [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/harapan-lama-sekolah-indonesia-naik-jadi-1308-tahun-pada2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,menem%20puh%20pendidikan%20hingga%20Diploma%20I.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/harapan-lama-sekolah-indonesia-naik-jadi-1308-tahun-pada2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,menem%20puh%20pendidikan%20hingga%20Diploma%20I.), diunduh tanggal 25 Juli 2022 pukul 19.47 WIB
- PDCA adalah. Pada <https://glints.com/id/lowongan/pdca-adalah/#.Yzz5rOxBxQI>, diunduh tanggal 5 Oktober 2022 pukul 10.55 WIB
- PDCA adalah. Pada <https://accurate.id/marketing-manajemen/pdca-adalah/>, diunduh tanggal 5 Oktober 2022 pukul 11.59 WIB
- Pertumbuhan ekonomi, lingkungan serta inklusif secara sosial. Pada <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/#:~:text=Green%20Growth%20atau%20Pertumbuhan%20Ekonomi,lingkungan%2C%20serta%20inklusif%20secara%20sosial.>, diunduh tanggal 28 Agustus 2022 pukul 16.17 WIB
- Berkah padi tahan air asin untuk petani pesisir Cilacap di masa pandemi. Pada <https://www.liputan6.com/regional/read/4391135/berkah-padi-tahan-air-asin-untuk-petani-pesisir-cilacap-di-masa-pandemi>, diunduh tanggal 23 Juli 2022 pukul 19.23 WIB
- Kabar baik Unsoed punya varietas padi tahan air asin untuk pesisir Cilacap. Pada <https://www.liputan6.com/regional/read/4257900/kabar-baik-unsoed-punya-varietas-padi-tahan-air-asin-untuk-pesisir-cilacap>, diunduh tanggal 25 Juli 2022 pukul 21.32 WIB

Perjuangan warga pesisir terbayar, Sultan Ground kini jadi lahan pertanian. Pada <https://jogja.suara.com/read/2020/09/16/212127/perjuangan-warga-pesisir-terbayar-sultan-ground-kini-jadi-lahan-pertanian>, diunduh tanggal 27 Juli pukul 19.03 WIB

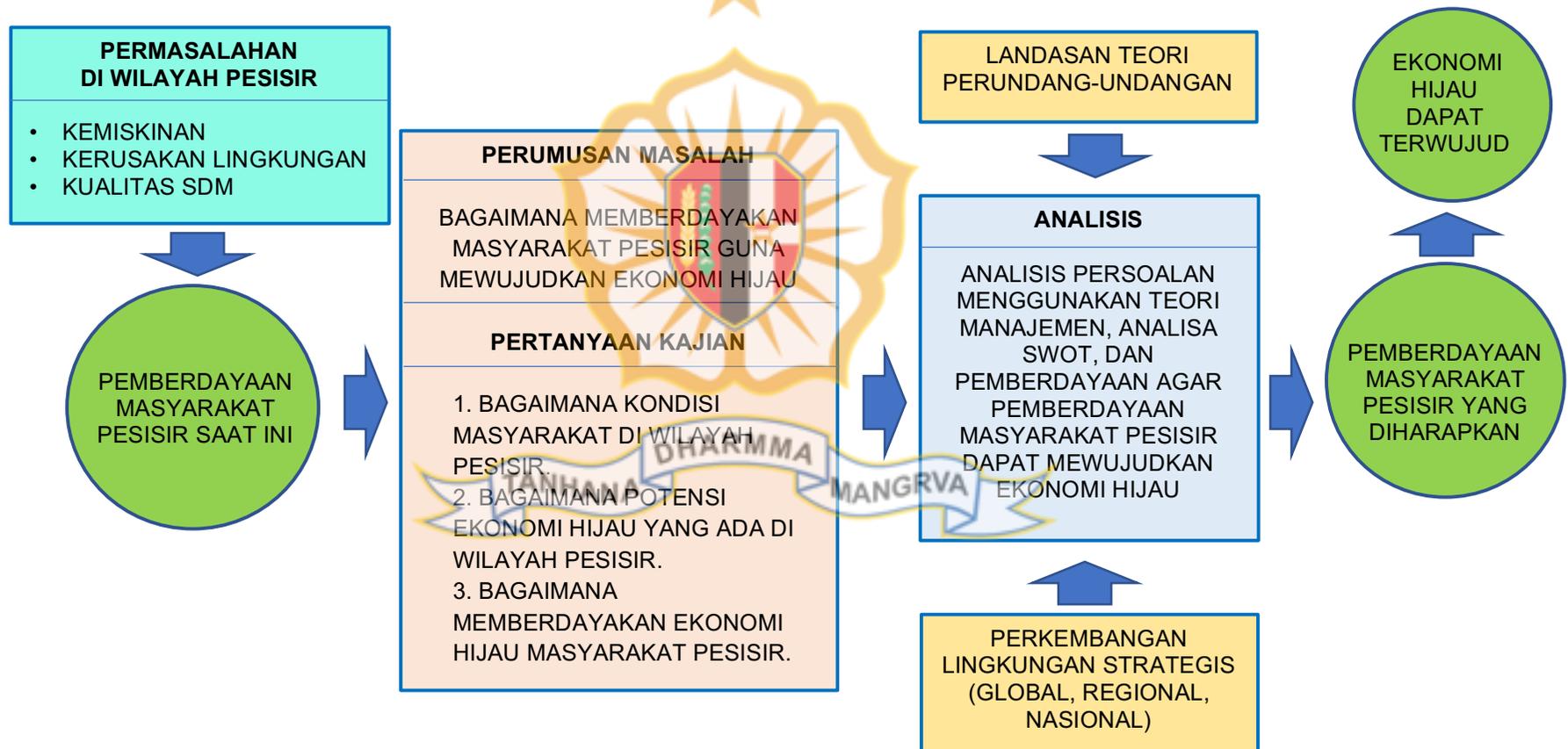
Ekonomi hijau dorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ekonomi-hijau-dorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan/>, diunduh tanggal 24 Juli 2022 pukul 17.05 WIB

Memahami kembali strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai sumber penerimaan negara. Pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/ide/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>, diunduh tanggal 29 Juli 2022 pukul 23.05 WIB

Menkominfo: akhir tahun 2022 internet tersedia di 83.548 desa-kelurahan. Pada <https://www.solopos.com/menkominfo-akhir-2022-internet-tersedia-di-83-548-desa-kelurahan-1209080>, diunduh tanggal 3 Agustus pukul 21.34 WIB



ALUR PIKIR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Strategi Green Economy
- Tabel 2 : Faktor-faktor IFAS
- Tabel 3 : Faktor-faktor EFAS
- Tabel 4 : Hasil Kuesioner Rating IFAS
- Tabel 5 : Hasil Kuesioner Rating EFAS
- Tabel 6 : Hasil akhir IFAS
- Tabel 7 : Hasil akhir EFAS



KUESIONER

Kuesioner Analisa SWOT Pemberdayaan Masyarakat Pesisir guna Mewujudkan Ekonomi Hijau

Survey Taskap PPRA LXIV/2022 Lemhannas Peserta Teddie Bernard Hernawan, nomor peserta 090.

Yth. Bapak dan Ibu responden

Kami peserta PPRA LXIV Lemhannas RI tahun 2022 sedang menyusun Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang berjudul Pemberdayaan masyarakat pesisir guna mewujudkan Ekonomi Hijau. Mohon partisipasi dalam pengisian data analisa SWOT guna melengkapi data dalam menentukan strategi Pemberdayaan masyarakat pesisir. Mohon diisi sebelum tanggal 4 Agustus 2022. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian

Indikator Jawaban menggunakan skala likert

1. Sangat Tidak Setuju bernilai 1
2. Tidak Setuju bernilai 2
3. Setuju bernilai 3
4. Sangat setuju bernilai 4

Pertanyaan kuesioner :

Kekuatan

1. Pembinaan masyarakat di wilayah pesisir di bidang pertanian dilaksanakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan ekonomi hijau adalah salah satu program utama pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

2. Perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah termasuk yang mengatur otonomi daerah sudah mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mewujudkan ekonomi hijau.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

3. Pemerintah Daerah dan instansi vertikal (TNI/Polri, Kementerian di Daerah) mempunyai hubungan yang baik dan dapat dimanfaatkan secara bersama melaksanakan pembinaan masyarakat pesisir.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

Kelemahan

1. Sinergitas program pemberdayaan masyarakat antara Pemda dan instansi vertikal saat ini masih lemah.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

2. Pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang pertanian membutuhkan biaya yang besar

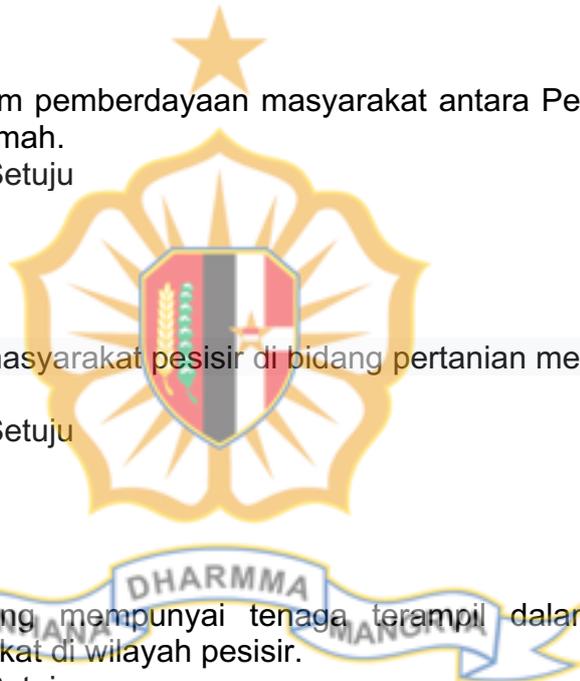
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

3. Pemerintah kurang mempunyai tenaga terampil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir rawan perubahan kebijakan dari pemerintah.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju



Peluang

1. TNI/Polri mempunyai program pembinaan teritorial yang dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah pesisir.
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Setuju
 4. Sangat setuju

2. Keterlibatan Lembaga Pendidikan/Universitas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah pesisir sangat dibutuhkan guna memecahkan masalah, mencari solusi dari sisi ilmu pengetahuan dan mendapat temuan varietas unggul padi tahan air asin dan pengembangan hortikultura.
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Setuju
 4. Sangat setuju

3. CSR dari perusahaan swasta dapat dimanfaatkan untuk memperkuat biaya dan pengolahan hasil pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Setuju
 4. Sangat setuju

4. Wilayah pesisir Indonesia adalah potensi yang besar untuk dapat dikembangkan pada sektor pertanian.
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Setuju
 4. Sangat setuju

5. Pertumbuhan penduduk Indonesia menyediakan tenaga kerja yang besar dapat menjadi modal potensial dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Setuju
 4. Sangat setuju

6. Keterlibatan TNI/Polri dalam melaksanakan kontrol harga pasar dan rantai distribusi dapat menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Setuju
 4. Sangat setuju

Ancaman

1. Perubahan iklim dunia yang berakibat perubahan suhu dan kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman bagi pemberdayaan masyarakat pesisir.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

2. Pemberdayaan masyarakat pesisir di sektor pertanian mendapat tantangan perkembangan sektor industri yang menarik generasi muda beralih ke sektor industri.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

3. Kemiskinan adalah masalah utama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

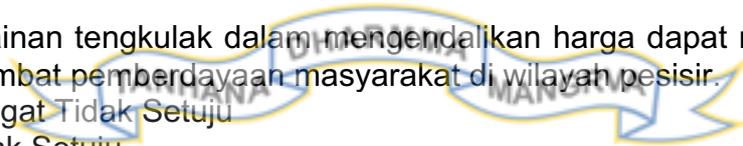
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

4. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab rendahnya Sumber Daya Manusia di wilayah pesisir.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

5. Permainan tengkulak dalam mengendalikan harga dapat merugikan petani dan menghambat pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju



Jawaban Responden :

RESPONDEN	KEKUATAN				KELEMAHAN				PELUANG						ANCAMAN				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1	3	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	1	4	2	3	2	2	2	4
2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	2	4	3	4	4	4
4	4	3	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3
5	4	3	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
6	3	3	4	4	2	3	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	4	4
7	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4
8	4	3	4	3	4	4	2	3	3	4	3	2	3	1	4	2	2	3	4
9	4	3	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
10	4	3	4	3	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4
11	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
12	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
13	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	4	4	4	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	2	3	3	3	1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4
16	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	2	4	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	3	2	2	2	3	4
18	3	2	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4	4
20	3	2	4	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
21	4	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4
22	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
23	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
25	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	2	4	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	3	4	4
27	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4
28	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
29	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4
30	4	4	3	4	2	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4
31	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4
34	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4
35	3	3	4	4	3	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
36	2	3	2	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	4	4	4
37	4	3	4	4	3	2	1	1	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4
38	4	3	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
39	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
40	4	3	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
41	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
42	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
43	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
44	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
45	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
46	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3
47	4	2	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4
49	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3
50	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3

RESPONDEN	KEKUATAN				KELEMAHAN				PELUANG						ANCAMAN				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
51	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	2	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
54	4	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
55	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
56	4	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
57	4	4	4	4	2	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3
58	4	3	4	4	2	2	3	2	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4
59	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3
60	4	3	3	4	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
61	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4
62	4	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
63	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
64	4	4	4	4	2	3	1	2	4	4	3	4	4	4	3	2	2	3	3



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah Kolonel Laut (P) Teddie Bernard Hernawan, S.E., M.A.P., CHRMP. Saat ini penulis sedang mengikuti Pendidikan Reguler Angkatan LXIV Lemhannas Tahun 2022. Lahir di Surabaya tanggal 16 Februari 1971 merupakan Alumni Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan 39 tahun 1993. Pada saat melaksanakan pendidikan di Lemhannas jabatan penulis adalah Staf Ahli 'A' Wilnas Panglima Komando Armada RI I Jakarta.

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Umum.
 - a. SDN 9 Pontianak Kalimantan Barat
 - b. SMPN 1 Pontianak Kalimantan Barat
 - c. SMAN 1 Pontianak Kalimantan Barat
 - d. S1 STIE Wilwatikta Surabaya
 - e. S2 Universitas Hang Tuah Surabaya
2. Pendidikan Militer
 - a. Akademi Angkatan Laut Angkatan XXXIX/1993
 - b. Dikpasis VI/AAL/1994
 - c. Sus PD BTK Kolatarmabar 1995
 - d. Suspaidikla Kolatarmabar 1995
 - e. Diklapa I/XII Komunikasi/1998
 - f. Diklapa Koum Angk.II/2003
 - g. Dikreg Sesko TNI AL Angk.46/2008
 - h. Susdanlanal Kolatarmabar 2010
 - i. Susopsgab TNI 2017
 - j. Dikreg Sesko TNI Angk.46/2019

Riwayat Jabatan.

1. Ass Kadepnop KRI Siada-862
2. Komandan KAL Sadarin II-201
3. Panops KRI Arung Samudera
4. Palaksa KRI Arung Samudera
5. Komandan KRI Arung Samudera
6. Palaksa KRI Teluk Cirebon-543
7. Komandan KRI Pulau Raibu-728
8. Palaksa Lanal Ranai

9. Pabanda Latma Staf Operasi Mabelsal
10. Komandan KRI Lemadang-806
11. Palaksa Lanal Batam
12. Komandan Denma Lantamal III Jakarta
13. Komandan Satgas Yekda PC-40 Banten
14. Asisten Operasi Lantamal III Jakarta
15. Staf Ahli "A" Wilnas Pangarmabar
16. Penugasan Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan
17. Wadan Lantamal III Jakarta
18. Kasubdit Pembinaan Korps Pelaut Dinas Operasi dan Latihan Mabelsal
19. Staf Ahli "A" Wilnas Pangkoarmada I

Tanda Jasa

1. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
2. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun
3. Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun
4. Bintang Jalasena Nararya Pratama
5. Satya Lencana Dharma Nusa
6. Satya Lencana Wira Dharma
7. Satya Lencana Wira Nusa
8. Satya Lencana Komandan KRI

Prestasi olahraga / Penghargaan yang pernah dicapai :

1. Juara 2 *Olympic Trapezoid* Layar Kelas 470 Kasal Cup 1994
2. Juara 3 *Marathon, Olympic Trapezoid dan Slalom* Layar kelas Enterprise Kasal Cup 1997
3. Juara 1 Div C *Sydney Hobart Tall Ships Race* 1997
4. Juara 1 *Classic Class Kings Cup Reggata Tall Ship* 1998
5. Juara 1 Div B Genoa Italia-Cadiz Spanyol *Trans Atlantic Tall Ships Race* 2000
6. Juara 1 Div B Cadiz Spanyol-Bermuda *Trans Atlantic Tall Ships Race* 2000
7. Juara 1 Div B Bermuda-Charleston USA *Trans Atlantic Tall Ships Race* 2000
8. Juara 1 Div B Boston USA-Halifax Canada *Trans Atlantic Tall Ships Race* 2000

Pengalaman penugasan Luar Negeri :

1. Asia : Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, Srilanka, Saudi Arabia, Yaman
2. Afrika : Djibouti, Mesir, Tunisia, Aljazair
3. Eropa : Italia, Spanyol
4. Amerika : Amerika Serikat, Bermuda, Canada
5. Australia : Australia